

PROFIL KETENAGAKERJAAN PROVINSI PAPUA 2015





PROFIL KETENAGAKERJAAN PROVINSI PAPUA 2015

PROFIL KETENAGAKERJAAN PROVINSI PAPUA 2015

I S S N : 2477-4553
No Publikasi : 94520.1601
Katalog BPS : 2303003.94
Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm (B5)
Jumlah Halaman : x + 86 halaman

Naskah :
Bidang Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Gambar Kulit :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Organisasi Penulisan

Penanggung Jawab : Johanes de Britto Priyono, M.Sc
Editor : Fadjri Amora, SE
Penulis dan Pengolah Data : Paul Santoso, S.ST
Layout : Paul Santoso, S.ST
Desain Cover : Ikfina Chairani, S.ST

Diterbitkan oleh :
© Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Dicetak oleh :
CV. Mitra Karya Pura

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua setiap tahun menerbitkan Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua. Profil Ketenagakerjaan ini disusun berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2015. Profil Ketenagakerjaan berisi informasi seputar keadaan tenaga kerja di Provinsi Papua.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran fenomena sosial terutama di bidang tenaga kerja dan gambaran tentang capaian pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, dan memberi perhatian sehingga publikasi ini bisa terwujud dengan segala keterbatasan dan kekurangannya.

Saran dan masukan sangat diharapkan guna menyempurnakan penerbitan publikasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Besar harapan kami semoga buku ini bermanfaat untuk semua, terima kasih.

Jayapura, Mei 2016

Kepala BPS Provinsi Papua



Johanes de Britto Priyono, M.Sc

NIP. 19590916 198501 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Organisasi Penulisan.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
Bab II Konsep dan Definisi	5
Bab III Penduduk Usia Kerja	16
3.1 Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur.....	16
3.2 Penduduk Usia Kerja menurut Kabupaten/Kota	18
3.3 Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama.....	19
Bab IV Penduduk Angkatan Kerja.....	22
4.1 Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	22
4.2 Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota	23
4.3 Angkatan Kerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan	26
Bab V Penduduk Bekerja	31
5.1 Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur	31
5.2 Penduduk Bekerja menurut Kabupaten/Kota	33
5.3 Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan	36
5.4 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha	38
5.5 Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja	44
5.6 Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan	46
5.7 Penduduk Bekerja menurut Sektor Formal Informal	50
Bab VI Pengangguran	53
6.1 Pengangguran menurut Kelompok Umur	53

6.2	Pengangguran menurut Kabupaten/Kota	54
6.3	Pengangguran menurut Kegiatannya	56
6.4	Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan	57
6.5	Setengah Pengangguran	58
Bab VII Indikator Ketenagakerjaan		61
7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61
7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	63
7.3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	65
7.4	Perkembangan Indikator Tenaga Kerja	66
7.5	Penduduk Bukan Angkatan Kerja	68
Bab VIII Kesimpulan		71

<http://papua.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Penduduk Usia Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2015	17
Tabel 3.2	Penduduk Usia Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015.....	18
Tabel 3.3	Penduduk Usia Kerja menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015.....	21
Tabel 4.1	Penduduk Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015.....	24
Tabel 4.2	Penduduk Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2015	28
Tabel 5.1	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015	34
Tabel 5.2	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2015	37
Tabel 5.3	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Tahun 2015	39
Tabel 5.4	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Tahun 2015	40
Tabel 5.5	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2015	43
Tabel 5.6	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2015.....	44
Tabel 5.7	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jumlah Jam Kerja di Provinsi Papua Tahun 2015	46
Tabel 6.1	Pengangguran menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015	55

Tabel 6.2	Pengangguran menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015	56
Tabel 7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015	62
Tabel 7.2	Tingkat Pangangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015	64
Tabel 7.3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015	66
Tabel 7.4	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2015	67
Tabel 7.5	Penduduk Bukan Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Papua Tahun 2015	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Ketenagakerjaan Sakernas	5
Gambar 3.1	Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama di Provinsi Papua Tahun 2015	20
Gambar 4.1	Penduduk Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua Tahun 2015	23
Gambar 4.2	Persentase Penduduk Angkatan Kerja menurut Topografi dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015	25
Gambar 4.3	Penduduk Angkatan Kerja menurut Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2015	26
Gambar 5.1	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua Tahun 2015	32
Gambar 5.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua Tahun 2015	33
Gambar 5.3	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2015	35
Gambar 5.4	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2015	36
Gambar 5.5	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan usaha dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2015	42
Gambar 5.6	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jam Kerja di Provinsi Papua Tahun 2015	45
Gambar 5.7	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015	47

Gambar 5.8	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2015	48
Gambar 5.9	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2015	49
Gambar 5.10	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015	50
Gambar 5.11	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2015	51
Gambar 6.1	Pengangguran menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015	54
Gambar 6.2	Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2015	58
Gambar 6.3	Setengah Penganggur Terpaksa menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015	59
Gambar 6.4	Setengah Penganggur Terpaksa menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2015	60
Gambar 7.1	TPAK menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015	62

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perekonomian suatu wilayah, penduduk dan Ketenagakerjaan merupakan komponen penting. Jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja, angka pengangguran merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketenagakerjaan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, dan sebaliknya semakin banyak tenaga kerja yang terserap maka akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, strategi/perencanaan di bidang ketenagakerjaan mutlak diperlukan. Oleh karena itu, data yang terkait dengan ketenagakerjaan perlu disediakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi.

Badan Pusat Statistik sebagai instansi penyedia data berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Data ketenagakerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Pelaksanaan Sakernas tahun 2015 dilakukan secara semesteran, yakni pada bulan Februari dan Agustus. Secara umum SAKERNAS yang dilaksanakan pada semester 1 dapat digunakan untuk mengestimasi keadaan tenaga kerja sampai level provinsi. Sementara itu, khusus untuk semester 2 (Agustus) dapat menyajikan data sampai level kabupaten/kota. Dari sisi penimbang (*weight*), indikator ketenagakerjaan dalam publikasi ini telah menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi.

Dari sisi penimbang (weight), indikator ketenagakerjaan dalam publikasi ini telah menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi

Melalui survei ini dapat diperoleh gambaran umum ketenagakerjaan seperti jumlah tenaga kerja yang tersedia, jumlah pengangguran, tingkat penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha, dan status pekerjaan dari penduduk yang bekerja. Selain itu, indikator-indikator penting ketenagakerjaan seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga dapat diketahui.

Provinsi Papua yang terdiri dari 29 kabupaten/kota mempunyai permasalahan ketenagakerjaan yang terbilang kompleks. Jika dilihat dari segi kuantitas, jumlah angkatan kerja maupun penduduk yang bekerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja sebanyak 1.610.484 meningkat menjadi 1.675.113 pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 menjadi 1.741.945. Pada periode yang sama, angka pengangguran meningkat dari 3,15 persen menjadi 3,99 persen.

Tingkat Pengangguran di Provinsi Papua tergolong rendah, bahkan lebih rendah dibanding angka nasional.

Secara umum, tingkat pengangguran di Papua masih tergolong rendah dan bahkan lebih rendah dibanding angka nasional (6,18 persen). Kondisi ini semestinya menjadi kondisi ideal untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Permasalahan mendasar ketenagakerjaan di Papua adalah rendahnya kualitas tenaga kerja.

maka akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, yang selanjutnya dapat menurunkan angka kemiskinan. Namun, kenyataan yang terjadi bukanlah demikian. Walaupun angka pengangguran terbilang rendah dan angkatan kerja yang tersedia dalam jumlah yang banyak, tidak serta merta berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Di tingkat nasional, Papua merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terbanyak, yaitu sebesar 28,40 persen (kondisi September 2015).

Permasalahan mendasar yang dihadapi Papua di bidang ketenagakerjaan adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Pendidikan dan keahlian rendah, jenis pekerjaan yang dilakukan pun adalah yang tidak membutuhkan *skill* tinggi, seperti bertani. Dampaknya pendapatan yang diterima juga relatif kecil. Hal inilah yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Papua.

Publikasi ini rutin disusun setiap tahun untuk memberikan Gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Papua. Selain itu, dalam publikasi ini juga memuat penjelasan, konsep dan definisi juga istilah-istilah (terminologi) ketenagakerjaan, sehingga pembaca dapat lebih memahami data dan informasi yang disajikan.

1.2 Ruang Lingkup

Publikasi Profil Ketenagakerjaan di Provinsi Papua 2015 disusun dari data SAKERNAS bulan Agustus 2015. Pembahasan dibatasi hanya sampai tingkat kabupaten/kota, mengingat kecukupan jumlah sampel hanya untuk estimasi sampai level kabupaten/kota.

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum publikasi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- Mengetahui komposisi penduduk usia kerja dirinci menurut jenis kelamin, jenis kegiatan, dan kelompok umur;
- Mengetahui karakteristik angkatan kerja menurut jenis kelamin, pendidikan, kelompok umur;
- Mengetahui karakteristik penduduk yang bekerja menurut jenis kelamin, pendidikan, kelompok umur, lapangan usaha, status pekerjaan, jam kerja, dan sektor formal/informal;
- Mengetahui karakteristik pengangguran menurut jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, dan jenis kegiatan;
- Mengetahui indikator ketenagakerjaan di setiap kabupaten/kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari delapan bab, dijabarkan sebagai berikut:

- Bab I. Berisi tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan sistematika penulisan.
- Bab II. Berisi konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan.
- Bab III. Membahas tentang karakteristik penduduk usia kerja yang dirinci menurut jenis kelamin, kelompok umur, kabupaten/kota, dan kegiatan terbanyak selama seminggu yang lalu.
- Bab IV. Berisi tentang karakteristik angkatan kerja, termasuk didalamnya bukan angkatan kerja yang dirinci menurut jenis kelamin, kelompok umur, kabupaten/kota, dan pendidikan.
- Bab V. Menjelaskan tentang kondisi penduduk yang bekerja yang dirinci menurut jenis kelamin, pendidikan, kelompok umur, lapangan usaha, status pekerjaan, jumlah jam kerja, dan kabupaten/kota.
- Bab VI. Berisi karakteristik pengangguran menurut jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, dan kabupaten/kota.
- Bab VII. Membahas tentang perkembangan dari beberapa indikator ketenagakerjaan, meliputi: TPAK, TPT, dan TKK.
- Bab VIII. Kesimpulan

BAB 2

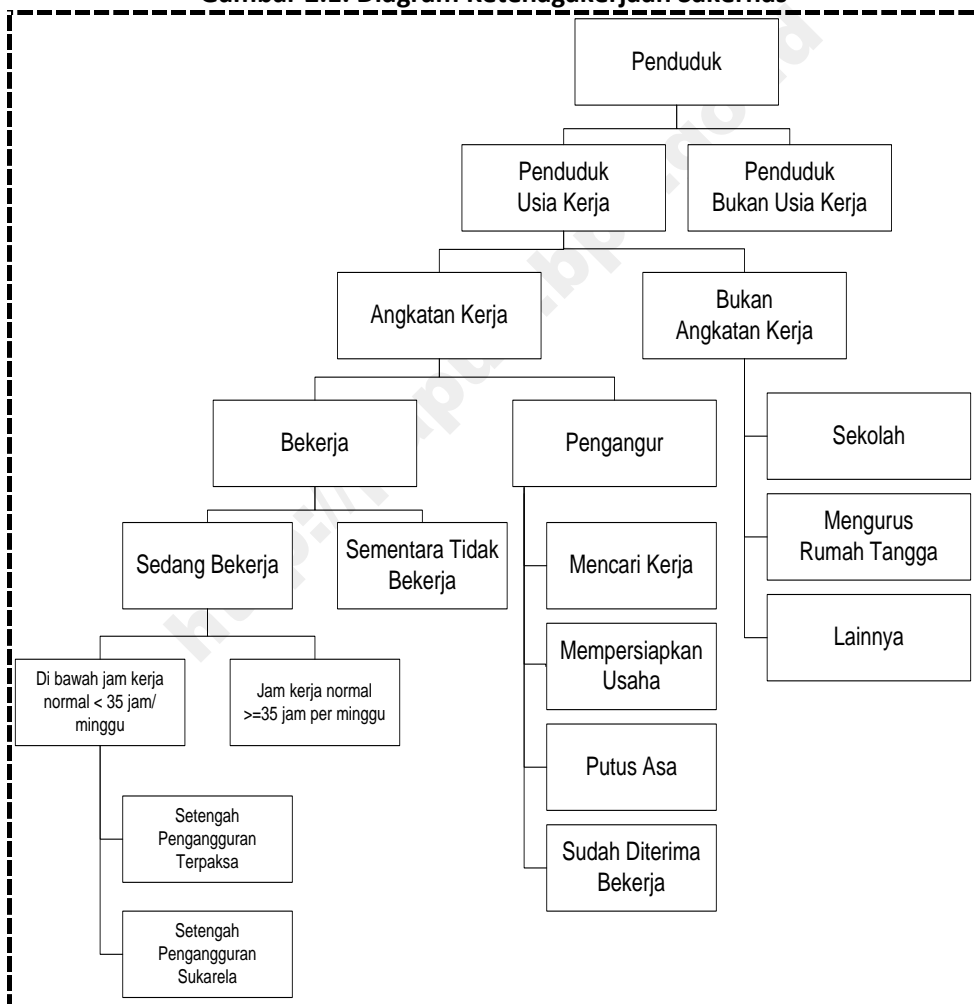
KONSEP DAN DEFINISI

BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik mengacu *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Konsep tersebut dapat digambarkan dalam diagram ketenagakerjaan berikut:

Gambar 2.1. Diagram Ketenagakerjaan Sakernas



Definisi yang berkaitan dengan penerapan konsep tersebut di Indonesia dijelaskan dalam uraian berikut:

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.

Penduduk Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Penduduk Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya, termasuk mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja. Mulai tahun 2011, mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja dikategorikan sebagai pengangguran (sesuai konsep ILO, hal. 97 "*An ILO Manual on Concepts and Methods*").

Contoh:

- a. Pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya.
- b. Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah).
- c. Orang-orang yang bekerja atas tanggungan/resikonya sendiri dalam suatu bidang keahlian, yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pesanan dan sebagainya. **Misalnya:** dalang, tukang cukur, tukang pijat, dan sebagainya.

Klasifikasi Formal–Informal

Beberapa pihak, mendefinisikan kegiatan informal hanya berdasarkan status pekerjaan, namun dalam publikasi ini, pendekatan batasan kegiatan informal diambil dari kombinasi antara jenis pekerjaan utama dan status pekerjaan. Batas kegiatan informal dapat dilihat seperti pada bagan berikut :

Batasan Kegiatan Informal

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama										
	Tenaga Profesional (2)	Tenaga Kepemimpinan (3)	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha (4)	Tenaga Penjualan (5)	Tenaga Usaha Jasa (6)	Tenaga Usaha Pertanian (7)	Tenaga Produksi (8)	Tenaga Operasional (9)	Pekerja Kasar (10)	Lainnya (11)	
(1) Berusaha Sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tak Dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	F	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buruh/Karyawan/Pegawai	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Bebas di Non Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Tak Dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Note : F = Formal

INF=Informal

Penduduk Pengangguran

Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
(lihat pada “*An ILO Manual on Concepts and Methods*”)

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka :

- a. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- b. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan. Mereka yang sedang bekerja atau yang sedang dibebaskan tugasnya, baik akan dipanggil kembali ataupun tidak, dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang “baru”, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila “**tindakannya nyata**”, seperti : mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/ tempat, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.

Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.

Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Penjelasan :

Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah Penganggur terdiri dari:

- a. **Setengah Penganggur Terpaksa** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- b. **Setengah Penganggur Sukarela** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).

Penduduk Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih yang tidak termasuk Angkatan Kerja yang dibedakan menurut jenis kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak antara lain sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya.

- a. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan.
- b. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
- c. **Kegiatan lainnya** adalah kegiatan seseorang selain disebut di atas, yakni mereka yang sudah pensiun, orang-orang yang cacat jasmani (buta, bisu dan sebagainya) yang tidak melakukan sesuatu pekerjaan seminggu yang lalu.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).

Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah jumlah jam kerja yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

Bagi pedagang keliling, jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja, seperti mampir ke rumah famili/kawan, dan sebagainya.

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja.

Jenis pekerjaan/jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan ini mengikuti KBJI (Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia) 2002 yang mengacu pada ISCO 88.

Upah/gaji bersih adalah penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan tersebut. Penerimaan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Penerimaan bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu :

- a. **Berusaha sendiri**, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- b. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar**, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.

- c. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar**, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- d. **Buruh/Karyawan/Pegawai**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.
- e. **Pekerja bebas di pertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi : pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian. **Majikan** adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.
- f. **Pekerja bebas di non pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi : usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/ bangunan, perdagangan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan. Huruf e dan f yang dikembangkan mulai pada publikasi 2001, pada tahun 2000 dan sebelumnya dikategorikan pada huruf d dan a (huruf e termasuk dalam d dan huruf f termasuk dalam a).
- g. **Pekerja tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

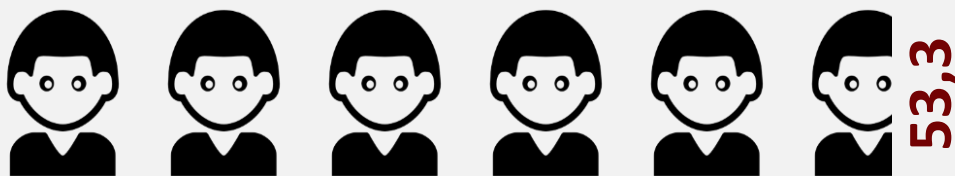
Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari :

- Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah.
- Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung.
- Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya.

<http://papua.bps.go.id>

Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan



BAB 3

PENDUDUK USIA KERJA

BAB III

PENDUDUK USIA KERJA

3.1 Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Dalam istilah ketenagakerjaan, penduduk usia kerja biasa disebut sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yang dari sisi usia dipandang telah mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Banyaknya tenaga kerja menyimpan potensi ekonomi yang dimiliki suatu wilayah. Mereka yang berpartisipasi aktif dalam pasar kerja biasa disebut dengan angkatan kerja. Sementara itu mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lain tergolong sebagai bukan angkatan kerja. Batasan umur yang digunakan Indonesia dalam mengelompokkan penduduk usia kerja mengacu pada konsep *International Labour Organization (ILO)*, yaitu 15 tahun ke atas. Sedangkan penduduk yang berusia di bawah 15 tahun digolongkan sebagai penduduk bukan usia kerja.

Jumlah penduduk usia kerja di Papua tahun 2014 sebesar 2.189.230 orang

Pada tahun 2015, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Papua mencapai 2.189.230 orang. Sekitar 77,80 persennya didominasi oleh penduduk usia muda (15 sampai 44 tahun). Sementara itu sekitar 22,20 persen merupakan penduduk berumur 45 tahun ke atas. *Supply* tenaga muda yang besar ini menjadi potensi yang luar biasa jika diiringi dengan peningkatan kualitas berupa keahlian dan keterampilan.

Secara umum persentase penduduk usia kerja laki-laki (53,3 persen) lebih banyak dibanding perempuan (46,7 persen). Hal ini sejalan dengan rasio jenis kelamin di Papua di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Jika dilihat menurut kelompok umur, persentase terbesar penduduk usia kerja adalah kelompok umur 15-19 tahun yang mencapai 14,3 persen.

Penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak daripada perempuan

Tabel 3.1
Penduduk Usia Kerja menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2015

Kel Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	% Penduduk Usia Kerja		% Kel Umur
	L	P		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-19	166 705	145 558	312 263	53,39%	46,61%	14,26
20-24	161 800	146 613	308 413	52,46%	47,54%	14,09
25-29	151 024	142 565	293 589	51,44%	48,56%	13,41
30-34	142 006	134 895	276 901	51,28%	48,72%	12,65
35-39	138 112	130 773	268 885	51,36%	48,64%	12,28
40-44	128 303	115 292	243 595	52,67%	47,33%	11,13
45-49	105 600	83 890	189 490	55,73%	44,27%	8,66
50-54	76 350	55 283	131 633	58,00%	42,00%	6,01
55-59	46 303	31 099	77 402	59,82%	40,18%	3,54
60-64	24 245	16 939	41 184	58,87%	41,13%	1,88
65+	26 344	19 531	45 875	57,43%	42,57%	2,10
Jumlah	1 166 792	1 022 438	2 189 230	53,30%	46,70%	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Dominasi peran penduduk usia muda merupakan sebuah keuntungan sekaligus menjadi *big opportunity* bagi pembangunan ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu perlu diperhatikan mengenai pendidikan dan keterampilannya, sehingga bukan hanya dominan dalam hal jumlah namun juga dalam kualitas. Kualitas tenaga kerja inilah yang menjadi *point* penting dalam meningkatkan produktivitas kerja yang akan berdampak pada kemajuan ekonomi. Usaha ini dapat dilakukan antara lain dengan membekali mereka dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai, dan sesuai dengan dunia usaha yang membutuhkan.

3.2 Penduduk Usia Kerja menurut Kabupaten/Kota

Jumlah penduduk usia kerja umumnya sebanding dengan jumlah penduduknya. Sebaran jumlah penduduk usia kerja menurut kabupaten/kota tahun 2015 secara lengkap tersaji pada Tabel 3.2 berikut. Jumlah penduduk usia kerja paling tinggi berada di Kota Jayapura yaitu sebanyak 205.761 orang atau sekitar 9,71 persen penduduk usia kerja di Papua. Sedangkan kabupaten dengan jumlah penduduk usia kerja paling sedikit adalah Kabupaten Supiori sebanyak 11.617 orang atau sekitar 0,53 persen dari seluruh jumlah penduduk usia kerja di Papua. Selanjutnya jika ditinjau menurut jenis kelamin, penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Hal ini terjadi hampir di semua kabupaten/kota.

Penduduk usia kerja paling banyak terdapat di Kota Jayapura dan terendah di Kabupaten Supiori.

Tabel 3.2
Penduduk Usia Kerja menurut Kabupaten/Kota dan
Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total	%
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9401. Merauke	81 402	72 996	154 398	7,05
9402. Jayawijaya	77 960	73 382	151 342	6,91
9403. Jayapura	46 445	39 922	86 367	3,95
9404. Nabire	54 861	45 796	100 657	4,60
9408. Kepulauan Yapen	31 939	29 857	61 796	2,82
9409. Biak Numfor	50 050	46 045	96 095	4,39
9410. Paniai	58 717	54 208	112 925	5,16
9411. Puncak Jaya	46 539	39 283	85 822	3,92
9412. Mimika	84 160	59 674	143 834	6,57
9413. Boven Digoel	23 880	18 690	42 570	1,94
9414. Mappi	29 493	27 989	57 482	2,63
9415. Asmat	28 033	26 942	54 975	2,51
9416. Yahukimo	63 670	58 846	122 516	5,60
9417. Pegunungan Bintang	25 217	22 447	47 664	2,18
9418. Tolikara	48 595	41 310	89 905	4,11
9419. Sarmi	14 108	11 634	25 742	1,18
9420. Keerom	21 293	17 083	38 376	1,75
9426. Waropen	9 936	9 333	19 269	0,88
9427. Supiori	5 906	5 711	11 617	0,53
9428. Mamberamo Raya	6 803	6 488	13 291	0,61
9429. Nduga	33 474	26 730	60 204	2,75
9430. Lanny Jaya	62 743	54 533	117 276	5,36
9431. Mamberamo Tengah	16 658	14 772	31 430	1,44
9432. Yalimo	22 404	19 204	41 608	1,90
9433. Puncak	36 994	34 075	71 069	3,25
9434. Dogiyai	29 693	30 358	60 051	2,74
9435. Intan Jaya	16 303	15 452	31 755	1,45
9436. Deiyai	23 975	22 679	46 654	2,13
9471. Kota Jayapura	115 541	96 999	212 540	9,71
Jumlah (Papua)	1 166 792	1 022 438	2 189 230	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2015

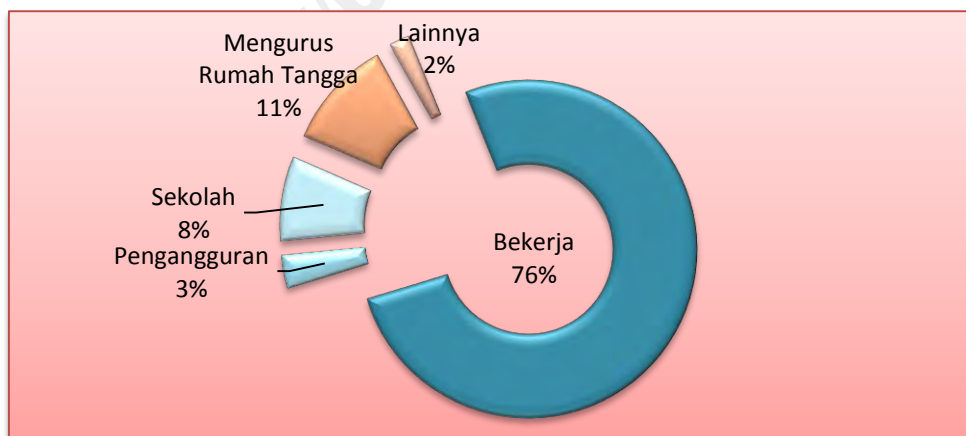
3.3 Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama

Berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan, penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang aktif secara ekonomi dalam pasar kerja. Sementara bukan angkatan kerja adalah mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya.

- Sebagian besar penduduk usia kerja berpendidikan sangat rendah
- Tingkat pendidikan perempuan relatif lebih rendah dibanding laki-laki

Konsep ini mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, kondisi secara umum yang terjadi di Indonesia termasuk Papua adalah banyak ditemukan adanya pekerja anak (15 tahun ke bawah). Meskipun mereka aktif secara ekonomi, namun mereka tidak digolongkan sebagai angkatan kerja karena tidak memenuhi konsep batasan umur penduduk usia kerja. Kedua, masih menganut asas eksklusivitas di mana seorang penduduk hanya dapat digolongkan dalam satu kategori. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Mereka hanya dapat dimasukkan dalam salah satu kategori, bekerja atau sekolah. Meskipun pada kenyataannya mereka melakukan kedua kegiatan tersebut.

Gambar 3.1
Persentase Penduduk Usia Kerja menurut
Kegiatan Utama di Provinsi Papua Tahun 2015



Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Berdasarkan Gambar 3.1 di atas, diketahui bahwa kegiatan utama sebagian besar penduduk Papua yang berusia 15 tahun ke atas adalah bekerja (76 persen). Sementara itu, persentase penduduk yang menganggur sebanyak 3 persen. Selanjutnya sebanyak 21 persen penduduk usia kerja

tidak terlibat secara aktif dalam perekonomian, yaitu mereka yang mengurus rumah tangga, sekolah, dan melakukan kegiatan lainnya masing-masing sebesar 11 persen, 8 persen, dan 2 persen.

Salah satu ukuran kualitas penduduk usia kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Lebih dari setengah penduduk usia kerja masih berpendidikan rendah. Ada sebanyak 39,42 persen penduduk usia kerja adalah mereka yang belum tamat SD atau bahkan belum pernah bersekolah, selanjutnya sebanyak 17,36 persen berpendidikan SD. Sementara itu, penduduk usia kerja yang berpendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) hanya 5,97 persen.

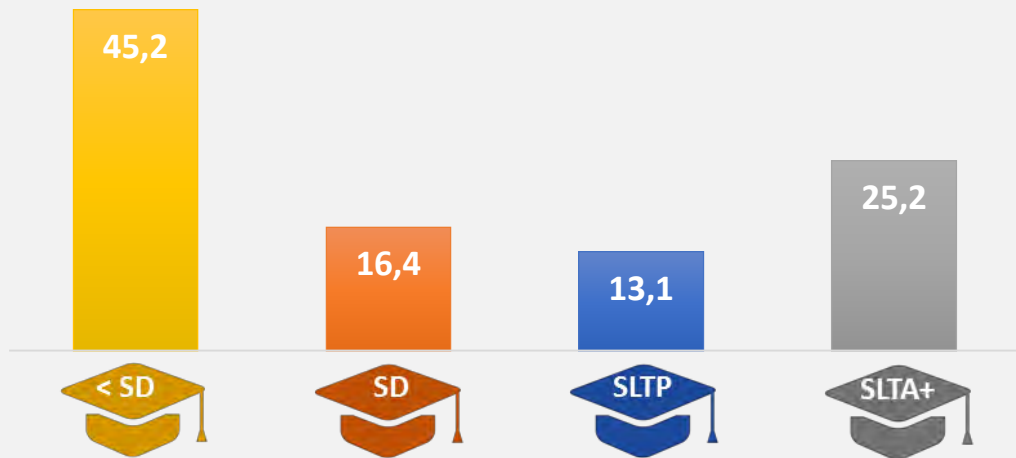
Sejalan dengan hal itu, jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan usia kerja yang berpendidikan di bawah SD (54 persen) lebih tinggi dibanding laki-laki. Namun sebaliknya untuk pendidikan SD ke atas secara persentase perempuan kalah dibanding laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa di Papua secara umum laki-laki mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibanding perempuan.

Tabel 3.3
Penduduk Usia Kerja menurut Tingkat Pendidikan dan
Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
di bawah SD	390 462	472 576	863 038
<i>(persentase)</i>	45.2%	54.8%	100.0%
SD	202 036	178 018	380 054
<i>(persentase)</i>	53.2%	46.8%	100.0%
SLTP	208 319	154 336	362 655
<i>(persentase)</i>	57.4%	42.6%	100.0%
SLTA	287 431	165 312	452 743
<i>(persentase)</i>	63.5%	36.5%	100.0%
PT	78 544	52 196	130 740
<i>(persentase)</i>	60.1%	39.9%	100.0%
Total	1 166 792	1 022 438	2 189 230
<i>(persentase)</i>	53.3%	46.7%	100.0%

Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Persentase Penduduk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang di Tamatkan



BAB 4

PENDUDUK ANGKATAN KERJA

BAB IV

PENDUDUK ANGKATAN KERJA

4.1 Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

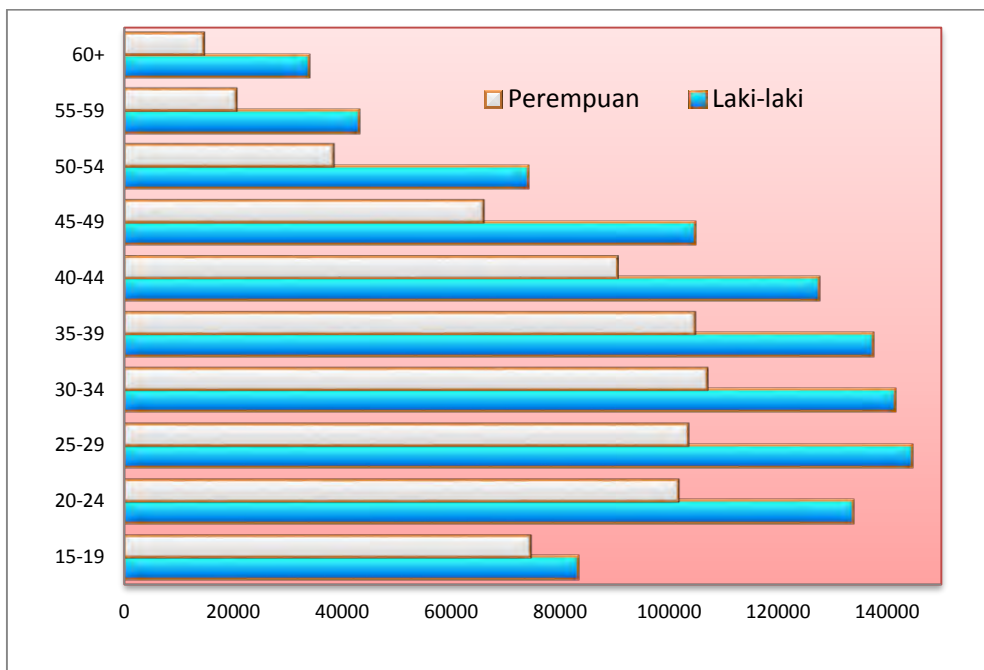
Jumlah penduduk angkatan kerja menggambarkan jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam perekonomian. Aktif di sini berarti bahwa mereka berusaha untuk menghasilkan/memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja dan pengangguran. Pengangguran tetap digolongkan ke dalam angkatan kerja karena meskipun mereka belum menghasilkan pendapatan, namun mereka berusaha mendapatkan pekerjaan.

Pada tahun 2015, jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua mencapai 1.741.945 orang. Hampir 58,72 persen dari jumlah tersebut berjenis kelamin laki-laki, sementara sisanya 41,28 persen adalah perempuan. Tidak dapat dipungkiri walaupun jumlah penduduk usia kerja antara laki-laki dan perempuan secara jumlah tidak terpaut jauh, namun kenyataannya laki-laki lebih banyak terlibat secara aktif dalam ekonomi dibanding perempuan. Sekitar 21 persen perempuan yang termasuk usia kerja lebih memilih mengurus rumah tangga dari pada terlibat secara aktif dalam perekonomian.

Umur akan sangat mempengaruhi penduduk apakah mereka akan masuk ke dalam pasar kerja atau tidak. Pada kelompok usia muda (15-19 tahun), sebagian besar penduduk cenderung memilih bekerja dari pada sekolah. Dengan semakin meningkatnya umur, maka makin banyak penduduk yang aktif dalam perekonomian, sampai mencapai puncaknya pada usia 30 an. Dan selanjutnya jumlah angkatan kerja akan kembali menurun seiring dengan banyaknya penduduk yang meninggalkan pasar kerja karena telah memasuki masa pensiun atau telah berhenti bekerja. Gambaran mengenai jumlah penduduk angkatan kerja yang dirinci berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur tersaji pada Gambar 4.1 berikut.

- *Jumlah angkatan kerja di Papua tahun 2015 sebesar 1.741.945 orang.*
- *Angkatan kerja paling banyak terdapat pada kelompok umur 30-34 tahun.*

Gambar 4.1
Penduduk Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua
Tahun 2015



Sumber: Sakernas, Agustus 2015

4.2 Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota

Sebaran angkatan kerja menurut kabupaten/kota di Papua tidak tergantung pada jumlah penduduk usia kerjanya, meskipun secara umum berlaku demikian. Jumlah penduduk usia kerja yang unggul secara kuantitas, seperti di Kota Jayapura tidak serta merta memiliki jumlah angkatan kerja yang besar pula. Tabel 4.1 di bawah menyajikan jumlah angkatan kerja per kabupaten/kota pada tahun 2015.

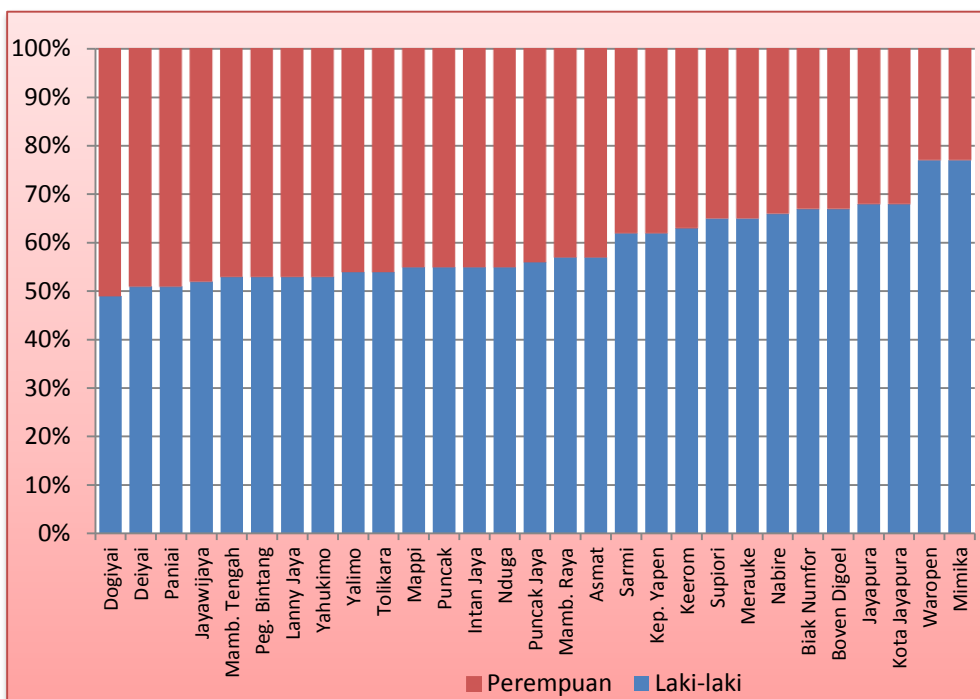
Angkatan kerja paling tinggi terdapat di Kabupaten Jayawijaya yaitu sebanyak 133.436 orang. Menyusul berikutnya adalah Kota Jayapura dengan angkatan kerja sebanyak 126.939 orang. Sedangkan Kabupaten Supiori mempunyai jumlah angkatan kerja paling kecil yaitu sebesar 6.737 orang.

Tabel 4.1
Penduduk Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua
Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9401. Merauke	71 080	37 460	108 540
9402. Jayawijaya	69 538	63 898	133 436
9403. Jayapura	35 179	16 917	52 096
9404. Nabire	45 926	23 548	69 474
9408. Kepulauan Yapen	26 231	16 214	42 445
9409. Biak Numfor	38 297	19 030	57 327
9410. Paniai	54 614	51 503	106 117
9411. Puncak Jaya	44 933	35 981	80 914
9412. Mimika	72 755	21 823	94 578
9413. Boven Digoel	21 307	10 308	31 615
9414. Mappi	25 687	21 218	46 905
9415. Asmat	24 193	18 234	42 427
9416. Yahukimo	59 130	51 636	110 766
9417. Pegunungan Bintang	24 108	21 511	45 619
9418. Tolikara	47 271	39 970	87 241
9419. Sarmi	11 446	7 141	18 587
9420. Keerom	18 850	11 167	30 017
9426. Waropen	7 982	2 446	10 428
9427. Supiori	4 366	2 371	6 737
9428. Mamberamo Raya	6 068	4 613	10 681
9429. Nduga	32 931	26 413	59 344
9430. Lanny Jaya	58 202	51 700	109 902
9431. Mamberamo Tengah	16 424	14 677	31 101
9432. Yalimo	22 404	19 077	41 481
9433. Puncak	34 318	27 979	62 297
9434. Dogiyai	27 262	28 821	56 083
9435. Intan Jaya	14 938	12 048	26 986
9436. Deiyai	21 497	20 365	41 862
9471. Kota Jayapura	85 920	41 019	126 939
Jumlah (Papua)	1 022 857	719 088	1 741 945

Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Gambar 4.2
Persentase Penduduk Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua
Tahun 2015



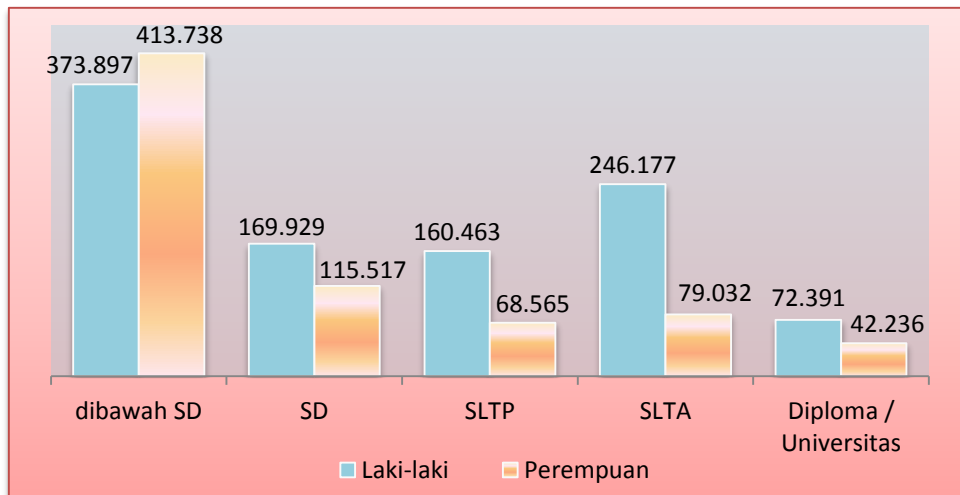
Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Jumlah angkatan kerja menurut jenis kelamin pada masing-masing kabupaten/kota bervariasi dan tergantung pada topografi wilayahnya. Kabupaten/kota yang termasuk dataran mudah, jumlah angkatan kerja laki-laki lebih mendominasi dibanding perempuan, minimum perbandingannya adalah 6 dibanding 4. Begitu pula untuk kabupaten dataran sulit, laki-laki masih mendominasi angkatan kerja. Sementara itu, di daerah pegunungan jumlah angkatan kerja hampir sepadan/sama antara laki-laki dan perempuan.

4.3 Angkatan Kerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Kualitas tenaga kerja suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan melihat tingkat pendidikannya. Gambaran mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja di Papua terdapat pada Gambar 4.3 berikut.

Gambar 4.3
Penduduk Angkatan Kerja menurut Pendidikan
di Provinsi Papua Tahun 2015



Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Secara umum kualitas angkatan kerja di Papua masih rendah. Hal ini terlihat dari sebagian besar angkatan kerja di Papua masih memiliki pendidikan lebih rendah dari SD. Persentase angkatan kerja yang tidak tamat SD atau bahkan yang belum pernah sekolah pada tahun 2014 ada sebanyak 39,4 sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 45,22 persen. Di sisi lain mereka yang berpendidikan tinggi (Diploma/Universitas) juga meningkat dari 5,3 menjadi 6,58 persen.

Selain itu, ketimpangan gender dalam hal pendidikan juga masih terlihat. Dari Gambar di atas kita dapat melihat bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Pada level pendidikan di bawah SD terlihat bahwa dari sisi jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Namun, semakin tinggi level pendidikan, ternyata laki-laki lebih beruntung dalam mengenyam pendidikan dibanding perempuan. Sebagai contoh pada level pendidikan SLTA, persentase laki-laki adalah sebanyak 75,7 persen, sedangkan perempuan hanya 24,3 persen begitu pula pada level pendidikan berikutnya. Potret keadaan pendidikan angkatan kerja ini hendaknya dapat menjadi acuan dalam penentuan kebijakan dalam bidang pendidikan terutama bagi perempuan.

Tabel 4.2
Penduduk Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan di
Provinsi Papua Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Pendidikan yang Ditamatkan				Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9401. Merauke	20,0%	28,6%	19,8%	31,7%	100,0%
9402. Jayawijaya	49,6%	17,1%	13,5%	19,9%	100,0%
9403. Jayapura	16,9%	14,7%	16,3%	52,1%	100,0%
9404. Nabire	7,5%	18,3%	16,6%	57,6%	100,0%
9408. Kep. Yapen	14,3%	23,5%	19,5%	42,7%	100,0%
9409. Biak Numfor	16,0%	14,1%	15,4%	54,4%	100,0%
9410. Paniai	53,8%	15,7%	17,1%	13,4%	100,0%
9411. Puncak Jaya	67,5%	17,0%	10,9%	4,6%	100,0%
9412. Mimika	13,7%	15,5%	16,8%	54,0%	100,0%
9413. Boven Digoel	31,8%	23,3%	18,1%	26,8%	100,0%
9414. Mappi	44,9%	21,1%	22,7%	11,2%	100,0%
9415. Asmat	68,2%	19,0%	6,0%	6,8%	100,0%
9416. Yahukimo	68,0%	20,7%	6,4%	4,8%	100,0%
9417. Peg. Bintang	63,8%	12,3%	8,1%	15,8%	100,0%
9418. Tolikara	64,3%	14,8%	9,7%	11,2%	100,0%
9419. Sarmi	17,7%	29,2%	20,3%	32,8%	100,0%
9420. Keerom	27,3%	23,7%	16,6%	32,5%	100,0%
9426. Waropen	14,4%	18,6%	16,7%	50,4%	100,0%
9427. Supiori	29,8%	17,2%	12,9%	40,1%	100,0%
9428. Mamb. Raya	33,3%	39,4%	9,0%	18,2%	100,0%
9429. Nduga	89,4%	6,9%	3,3%	,3%	100,0%
9430. Lanny Jaya	70,9%	5,5%	11,0%	12,5%	100,0%
9431. Mamb. Tengah	62,0%	10,4%	12,3%	15,2%	100,0%
9432. Yalimo	58,9%	22,2%	11,8%	7,1%	100,0%
9433. Puncak	77,8%	8,2%	4,8%	9,1%	100,0%
9434. Dogiyai	48,0%	33,8%	13,8%	4,4%	100,0%
9435. Intan Jaya	77,8%	8,3%	7,2%	6,6%	100,0%
9436. Deiyai	64,2%	10,0%	12,7%	13,1%	100,0%
9471. Kota Jayapura	6,8%	6,6%	14,3%	72,3%	100,0%
Jumlah (Papua)	45,2%	16,4%	13,1%	25,2%	100,0%

Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Tingginya jumlah angkatan kerja dengan pendidikan tidak tamat SD terjadi di seluruh kabupaten, kecuali pada Kabupaten Jayapura, dan Nabire yang masing-masing hanya 6,8 persen dan 7,5 persen. Sementara itu, Kabupaten Puncak dan Intan Jaya merupakan kabupaten dengan jumlah angkatan kerja yang pendidikan tidak tamat SD paling banyak yaitu

mencapai 77,8 persen. Umumnya kabupaten-kabupaten di daerah pegunungan, lebih dari separuh penduduk angkatan kerjanya mempunyai pendidikan SD ke bawah. Hal ini terutama disebabkan karena masih minimnya fasilitas pendidikan di daerah tersebut.

Di sisi lain, kabupaten dengan persentase angkatan kerja yang berpendidikan SLTA ke atas cukup tinggi adalah Kota Jayapura (72,3 persen), Kabupaten Biak Numfor (54,4 persen) dan Kabupaten Mimika (54 persen). Ketiga daerah ini relatif lebih maju dibanding daerah lainnya, selain itu sebagai daerah yang berstatus kota yang biasanya memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan juga relatif lebih tinggi.

Kota Jayapura yang merupakan ibukota Provinsi Papua dan menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi mempunyai kuantitas dan kualitas angkatan kerja yang terbilang maju dibanding kabupaten lainnya di Papua. Hal ini akan menjadi sebuah modal dasar penggerak laju pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, tentunya akan menjadi catatan sendiri bagi Pemerintah dalam membangun dan mendongkrak pendidikan terutama di daerah pegunungan agar kualitas tenaga kerjanya dapat ditingkatkan.

Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya mempunyai persentase angkatan kerja berpendidikan SLTA ke atas yang cukup tinggi.

BAB 5

PENDUDUK BEKERJA

BAB V

PENDUDUK BEKERJA

5.1 Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur

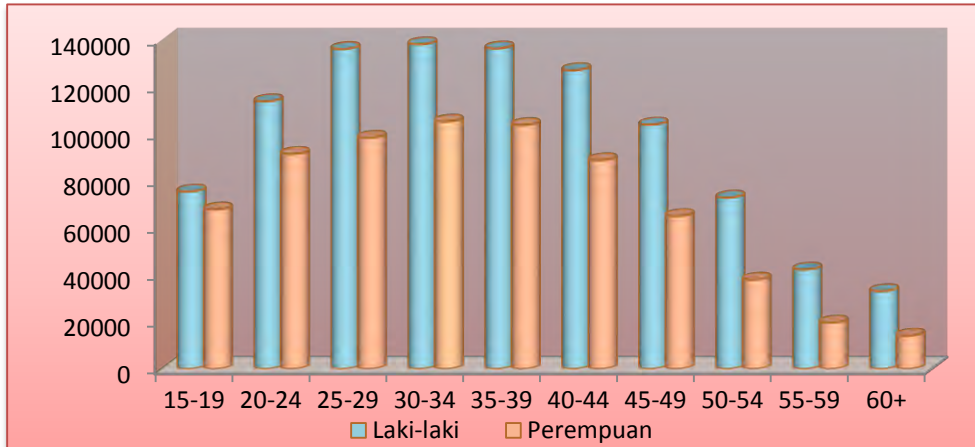
Dalam menganalisis ketenagakerjaan, penduduk yang bekerja dapat dibedakan menurut kelompok umur. Tujuannya adalah untuk melihat kontribusi pekerja berdasarkan kelompok umur dalam dunia pasar kerja. Idealnya, mayoritas penduduk yang bekerja dalam pasar kerja adalah mereka yang berusia prima. Namun tidak menutup kemungkinan penduduk usia muda dan tua dapat ikut andil dalam pasar tenaga kerja tersebut. Hal ini antara lain disebabkan adanya rasa tanggung jawab untuk mencari nafkah dan membantu ekonomi rumah tangga dan keluarga.

Pada tahun 2015 jumlah penduduk bekerja di Provinsi Papua sebanyak 1.672.480 orang atau setara 96 persen dari seluruh angkatan kerja yang ada. Dari jumlah tersebut sekitar 59 persen adalah laki-laki, sementara sisanya 41 persen adalah perempuan. Sementara itu, distribusi penduduk yang bekerja menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat dari Gambar 5.1 berikut.

Secara umum penduduk yang bekerja pada setiap kelompok umur memiliki pola yang sama antara laki-laki dan perempuan. Pada kelompok umur muda belum banyak penduduk yang terjun ke pasar kerja. Hal ini disebabkan karena mereka lebih cenderung memilih untuk bersekolah dibanding bekerja. Selanjutnya, memasuki usia prima (25 tahun ke atas) jumlah penduduk yang bekerja pun meningkat, sampai mencapai puncaknya pada kelompok usia 30-34 tahun yang mencapai 343.379 orang atau sekitar 14,55 persen. Sedangkan pekerja usia tua (55 tahun ke atas) yang masih aktif bekerja ada sebanyak 6,54 persen.

Penduduk bekerja di Papua paling banyak berada pada kelompok usia 30-34 tahun.

Gambar 5.1
Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di
Provinsi Papua
Tahun 2015

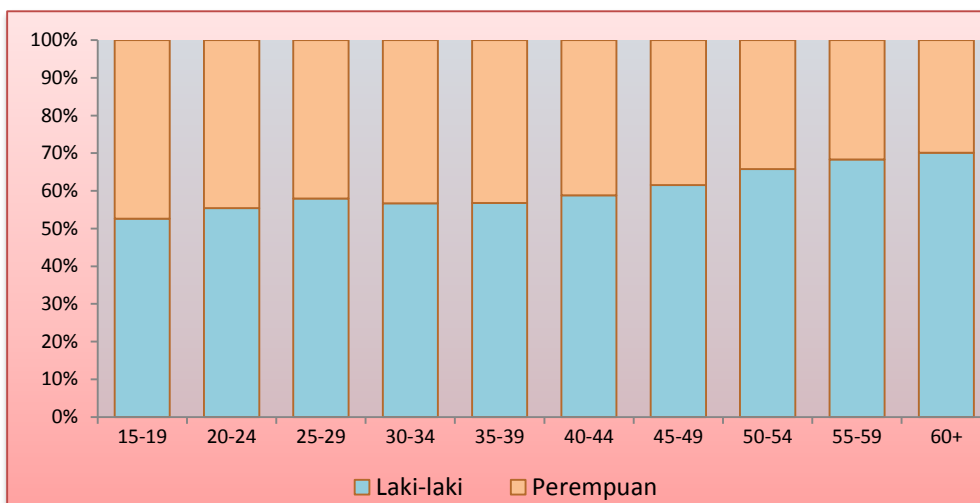


Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Selain itu, dari Gambar di atas juga menunjukkan bahwa penduduk usia kerja dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal ini berlaku pada setiap kelompok umur, di mana secara jumlah dan persentase perempuan yang bekerja berada di bawah laki-laki.

Sejalan dengan kondisi tersebut, persentase perempuan yang terlibat dalam dunia kerja juga mengalami penurunan seiring dengan peningkatan umurnya. Sebaliknya, persentase laki-laki yang bekerja pada setiap kelompok umur justru mengalami peningkatan. Sebagai ilustrasi tampak pada kelompok usia 45-49 tahun, persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja berturut-turut adalah 61 persen dan 39 persen. Kemudian pada kelompok usia 60 tahun ke atas persentasenya menjadi 70 persen dan 30 persen. Persentase penduduk bekerja menurut jenis kelamin pada setiap kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 5.2 di bawah ini.

Gambar 5.2
Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan
Kelompok Umur di Provinsi Papua
Tahun 2015



Sumber: Sakernas, Agustus 2015

5.2 Penduduk Bekerja menurut Kabupaten/Kota

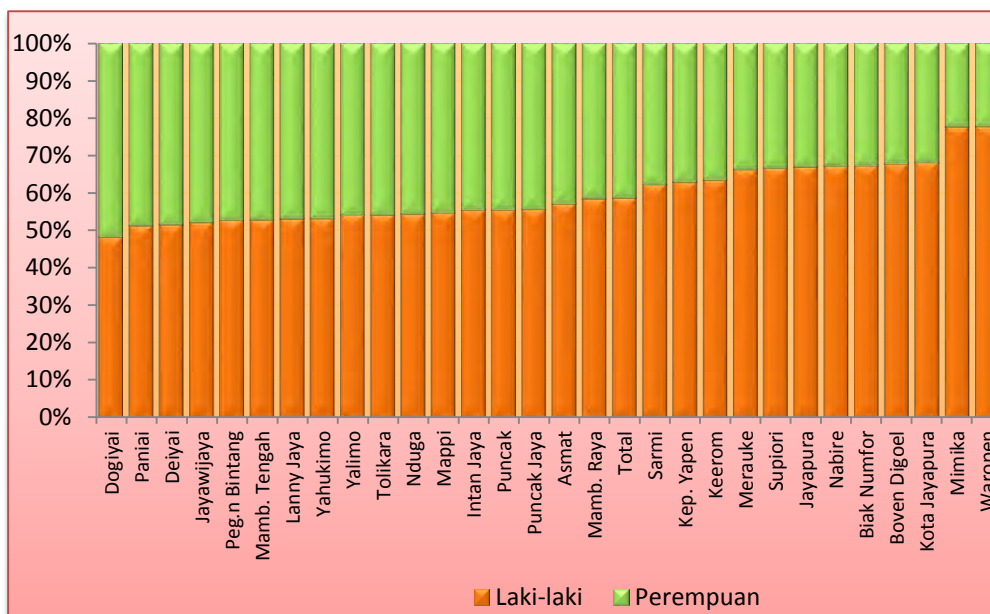
Pola sebaran penduduk bekerja di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota sama dengan pola sebaran angkatan kerja yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kabupaten dengan jumlah penduduk bekerja paling tinggi terdapat pada Kabupaten Jayawijaya, yaitu sebanyak 133.361 orang dan yang paling rendah adalah Kabupaten Supiori sebanyak 6.013 orang.

Tabel 5.1 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9401. Merauke	65 299	33 389	98 688
9402. Jayawijaya	69 538	63 823	133 361
9403. Jayapura	29 956	14 830	44 786
9404. Nabire	41 915	20 513	62 428
9408. Kep. Yapen	24 692	14 552	39 244
9409. Biak Numfor	34 671	16 879	51 550
9410. Paniai	53 847	51 384	105 231
9411. Puncak Jaya	44 587	35 608	80 195
9412. Mimika	67 563	19 507	87 070
9413. Boven Digoel	20 275	9 649	29 924
9414. Mappi	24 888	20 640	45 528
9415. Asmat	24 108	18 095	42 203
9416. Yahukimo	58 522	51 636	110 158
9417. Peg. Bintang	23 381	20 997	44 378
9418. Tolikara	46 977	39 843	86 820
9419. Sarmi	11 213	6 804	18 017
9420. Keerom	18 243	10 516	28 759
9426. Waropen	7 742	2 224	9 966
9427. Supiori	4 002	2 011	6 013
9428. Mamb. Raya	6 040	4 305	10 345
9429. Nduga	31 330	26 413	57 743
9430. Lanny Jaya	58 202	51 700	109 902
9431. Mamb. Tengah	16 424	14 677	31 101
9432. Yalimo	22 382	19 077	41 459
9433. Puncak	34 160	27 537	61 697
9434. Dogiyai	26 831	28 821	55 652
9435. Intan Jaya	14 938	12 048	26 986
9436. Deiyai	20 335	19 165	39 500
9471. Kota Jayapura	77 451	36 325	113 776
Jumlah (Papua)	979 512	692 968	1 672 480

Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Gambar 5.3
Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015



Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Gambar 5.3 di atas menunjukkan distribusi penduduk yang bekerja menurut kabupaten dan jenis kelamin. Dari gambar tersebut tampak bahwa pada kabupaten dengan topografi berupa dataran yang mudah dijangkau, persentase penduduk laki-laki yang bekerja lebih banyak dibanding perempuan. Demikian halnya dengan kabupaten yang tergolong bertopografi dataran sulit, secara umum laki-laki lebih mendominasi dalam hal pekerjaan. Sebaliknya, pada beberapa kabupaten di pegunungan persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja hampir sama. Contohnya di Kabupaten Deiyai dan Paniai, persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja masing-masing adalah 51 persen di mana secara persentase tidak terpaut jauh.

5.3 Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan

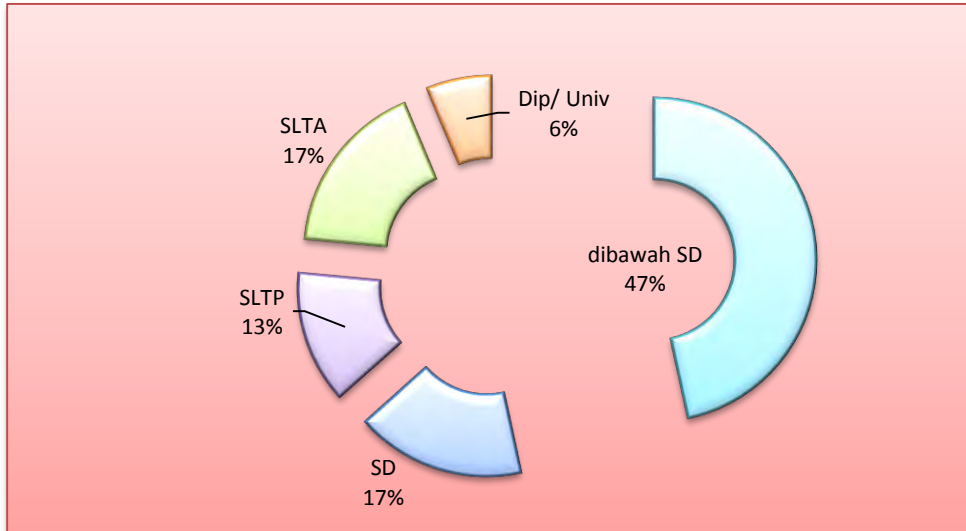
Selain dapat dibedakan menurut kelompok umur, dalam ketenagakerjaan penduduk yang bekerja juga dapat dibedakan menurut tingkat pendidikan. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat

keahlian atau keterampilan tertentu sesuai dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang tidak menjamin semakin mudah baginya untuk memperoleh pekerjaan apalagi yang sesuai dengan pendidikannya. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan pasar tenaga kerja yang dimasuki seseorang yang berpendidikan tinggi tak jarang menjadi tidak tepat.

Pada tahun 2015, lebih dari separuh penduduk yang bekerja adalah berpendidikan SD ke bawah, bahkan 46 persennya merupakan penduduk yang tidak tamat SD atau belum pernah sekolah. Tingkat pendidikan berikutnya adalah SLTP dan SLTA yang berturut-turut mempunyai persentase 13 persen dan 17 persen. Sementara penduduk dengan tingkat pendidikan Diploma ke atas hanya sekitar 6 persen. Keadaan tersebut masih sama dengan potret data yang dihasilkan pada tahun sebelumnya

<http://papua.bps.go.id>

Gambar 5.4
Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Pendidikan yang
Ditamatkan di Provinsi Papua
Tahun 2015



Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Tabel 5.2
Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang
Ditamatkan di Provinsi Papua
Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Pendidikan yang Ditamatkan				Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9401. Merauke	19 094	29 780	20 057	29 757	98 688
9402. Jayawijaya	66 155	22 770	18 012	26 424	133 361
9403. Jayapura	8 165	6 989	7 883	21 749	44 786
9404. Nabire	5 245	12 134	10 007	35 042	62 428
9408. Kep. Yapen	6 069	9 873	7 428	15 874	39 244
9409. Biak Numfor	8 897	7 819	8 734	26 100	51 550
9410. Paniai	57 118	16 622	18 140	13 351	105 231
9411. Puncak Jaya	54 285	13 664	8 791	3 455	80 195
9412. Mimika	12 714	14 447	14 061	45 848	87 070
9413. Boven Digoel	9 694	7 191	5 288	7 751	29 924
9414. Mappi	20 847	9 530	9 967	5 184	45 528
9415. Asmat	28 774	8 077	2 531	2 821	42 203
9416. Yahukimo	75 359	22 914	7 012	4 873	110 158
9417. Peg. Bintang	28 788	5 347	3 489	6 754	44 378
9418. Tolikara	56 059	12 909	8 196	9 656	86 820
9419. Sarmi	3 288	5 424	3 637	5 668	18 017
9420. Keerom	8 070	7 046	4 620	9 023	28 759
9426. Waropen	1 497	1 936	1 683	4 850	9 966
9427. Supiori	1 813	1 041	768	2 391	6 013
9428. Mamb. Raya	3 562	4 071	963	1 749	10 345
9429. Nduga	51 459	4 117	1 975	192	57 743
9430. Lanny Jaya	77 971	6 090	12 121	13 720	109 902
9431. Mamb. Tengah	19 291	3 250	3 824	4 736	31 101
9432. Yalimo	24 408	9 217	4 895	2 939	41 459
9433. Puncak	48 225	5 127	3 018	5 327	61 697
9434. Dogiyai	26 926	18 671	7 743	2 312	55 652
9435. Intan Jaya	21 001	2 236	1 956	1 793	26 986
9436. Deiyai	26 893	4 173	5 134	3 300	39 500
9471. Kota Jayapura	7 070	7 988	17 418	81 300	113 776
Jumlah (Papua)	778 737	280 453	219 351	393 939	1 672 480

Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Begitu juga jika melihat tingkat pendidikan pekerja menurut kabupaten/kota yang disajikan pada Tabel 5.2 di atas. Pekerja berpendidikan kurang dari SD dan tamat SD memiliki persentase terbesar

dari jumlah pekerja di masing-masing kabupaten kecuali pada Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika dengan persentase dari masing-masing kurang dari 1 persen.

Kualitas pendidikan pekerja yang masih rendah ini terutama terjadi di daerah pegunungan yang minim fasilitas pendidikan. Bahkan di Kabupaten Deiyai memiliki pekerja berpendidikan SD kebawah dengan persentase di atas 80 persen. Kenyataan yang masih menyisakan tugas berat bagi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah setempat untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan pekerjanya. Namun demikian kondisi ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, nampak bahwa terjadi peningkatan partisipasi penduduk bekerja dengan pendidikan SLTA, Diploma dan seterusnya.

Di sisi lain pekerja dengan pendidikan tinggi (Diploma/ Universitas) masih merupakan fenomena langka yang jarang ditemukan terutama pada kabupaten di daerah pegunungan. Buktinya adalah persentase pekerja berpendidikan tinggi rata-rata masih di bawah 5 persen. Salah satu penyebabnya adalah tidak tersedianya lapangan kerja yang sesuai dengan pendidikan mereka, sehingga mereka akan cenderung bermigrasi ke daerah lain.

5.4 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan tempat bekerja di mana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha yang digunakan BPS mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha akan menunjukkan sektor ekonomi apa yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Untuk memudahkan dalam analisis, publikasi ini menggunakan pengelompokan lapangan usaha dalam tiga kelompok, yaitu pertanian, industri, dan Jasa. Tabel 5.3 dan Tabel 5.4 di bawah menggambarkan distribusi penduduk yang bekerja menurut kabupaten/kota dan lapangan pekerjaan utama.

Tabel 5.3
Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
	Pertanian	Industri	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9401. Merauke	51.018	12.322	35.348	98.688
9402. Jayawijaya	120.393	744	12.224	133.361
9403. Jayapura	22.634	4.794	17.358	44.786
9404. Nabire	21.531	7.742	33.155	62.428
9408. Kep. Yapen	22.442	2.533	14.269	39.244
9409. Biak Numfor	21.037	4.799	25.714	51.550
9410. Paniai	92.317	392	12.522	105.231
9411. Puncak Jaya	72.430	211	7.554	80.195
9412. Mimika	22.663	16.730	47.677	87.070
9413. Boven Digoel	19.150	2474	8.300	29.924
9414. Mappi	38.358	2.812	4.358	45.528
9415. Asmat	38.904	60	3.239	42.203
9416. Yahukimo	106.180	456	3.522	110.158
9417. Peg. Bintang	36.942	470	6.966	44.378
9418. Tolikara	80.453	0	6.367	86.820
9419. Sarmi	12.351	1.049	4.617	18.017
9420. Keerom	20.343	2.169	6.247	28.759
9426. Waropen	5.827	249	3.890	9.966
9427. Supiori	3.206	606	2.201	6.013
9428. Mamb. Raya	9.405	37	903	10.345
9429. Nduga	57.743	0	0	57.743
9430. Lanny Jaya	106.703	0	3.199	109.902
9431. Mamb. Tengah	29.674	0	1.427	31.101
9432. Yalimo	41.459	0	0	41.459
9433. Puncak	57.476	591	3.630	61.697
9434. Dogiyai	55.285	0	367	55.652
9435. Intan Jaya	26.197	38	751	26.986
9436. Deiyai	36.211	464	2.825	39.500
9471. Kota Jayapura	8.205	15.080	90.491	113.776
Jumlah (Papua)	1.236.537	76.822	359.121	1.672.480

Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Tabel 5.4
Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan
Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua
Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
	Pertanian	Industri	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9401. Merauke	51,7%	12,5%	35,8%	100,0%
9402. Jayawijaya	90,3%	,6%	9,2%	100,0%
9403. Jayapura	50,5%	10,7%	38,8%	100,0%
9404. Nabire	34,5%	12,4%	53,1%	100,0%
9408. Kep. Yapen	57,2%	6,5%	36,4%	100,0%
9409. Biak Numfor	40,8%	9,3%	49,9%	100,0%
9410. Paniai	87,7%	,4%	11,9%	100,0%
9411. Puncak Jaya	90,3%	,3%	9,4%	100,0%
9412. Mimika	26,0%	19,2%	54,8%	100,0%
9413. Boven Digoel	64,0%	8,3%	27,7%	100,0%
9414. Mappi	84,3%	6,2%	9,6%	100,0%
9415. Asmat	92,2%	,1%	7,7%	100,0%
9416. Yahukimo	96,4%	,4%	3,2%	100,0%
9417. Peg. Bintang	83,2%	1,1%	15,7%	100,0%
9418. Tolikara	92,7%	0,0%	7,3%	100,0%
9419. Sarmi	68,6%	5,8%	25,6%	100,0%
9420. Keerom	70,7%	7,5%	21,7%	100,0%
9426. Waropen	58,5%	2,5%	39,0%	100,0%
9427. Supiori	53,3%	10,1%	36,6%	100,0%
9428. Mamb. Raya	90,9%	,4%	8,7%	100,0%
9429. Nduga	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
9430. Lanny Jaya	97,1%	0,0%	2,9%	100,0%
9431. Mamb. Tengah	95,4%	0,0%	4,6%	100,0%
9432. Yalimo	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
9433. Puncak	93,2%	1,0%	5,9%	100,0%
9434. Dogiyai	99,3%	0,0%	,7%	100,0%
9435. Intan Jaya	97,1%	,1%	2,8%	100,0%
9436. Deiyai	91,7%	1,2%	7,2%	100,0%
9471. Kota Jayapura	7,2%	13,3%	79,5%	100,0%
Jumlah (Papua)	73,9%	4,6%	21,5%	100,0%

Sumber: Sakernas, Agustus 2015

- *Sektor Pertanian masih menjadi sektor unggulan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Papua.*
- *Akan tetapi, pada beberapa Kabupaten/Kota sudah mengalami pergeseran dari pertanian ke industri dan jasa.*

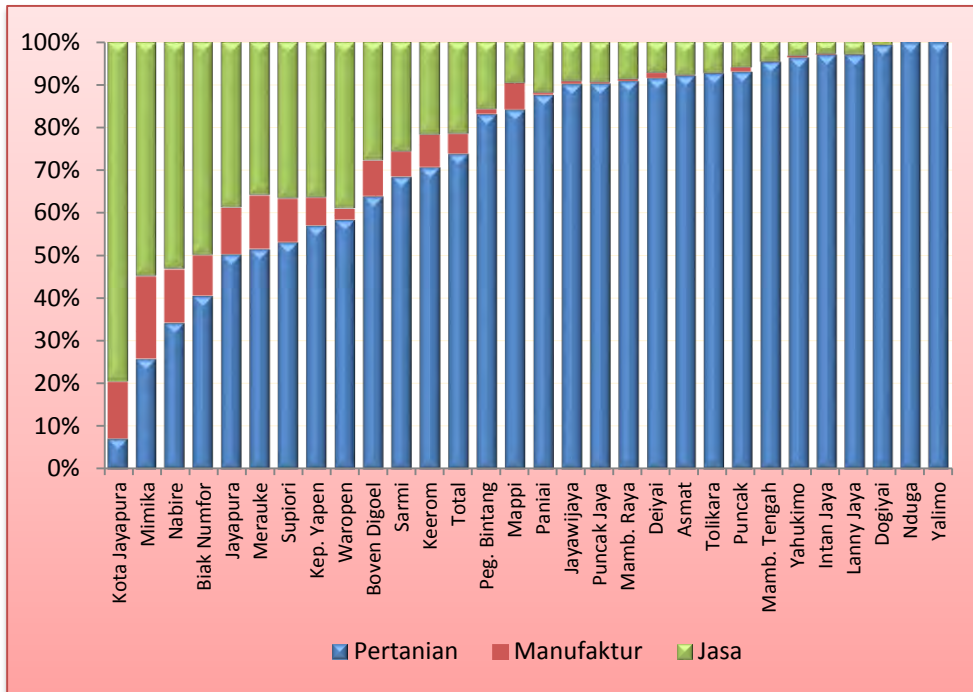
Kedua tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Papua bertumpu pada sektor pertanian. Pada tahun 2015, persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mencapai 1.141.671 orang atau sekitar 74 persen dari total seluruh pekerja. Sementara itu, sektor berikutnya yang menjadi tulang punggung perekonomian Papua adalah sektor jasa dengan jumlah pekerja sebanyak 359.121 orang atau sekitar 21 persen. Kemudian pekerja yang bekerja pada sektor industri hanya sekitar 5 persen. Meskipun pada dasarnya kontribusi terbesar perekonomian Papua berasal dari

sektor manufaktur berupa pertambangan, namun kenyataannya tenaga kerja yang terserap di sektor ini hanya sedikit.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, belum ada pergeseran sektor yang berarti dalam struktur perekonomian Papua. Pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan. Namun jika ditinjau menurut kabupaten/kota, ada beberapa kabupaten/kota di mana sektor pertanian bukan merupakan sektor unggulan, karena telah mengalami pergeseran ke sektor sekunder. Gambaran mengenai persentase pekerja menurut lapangan usaha dan topografi wilayah tersaji pada Gambar 5.5 berikut.

Pergeseran struktur perekonomian dari pertanian ke sektor industri dan jasa umumnya terjadi di daerah dataran rendah. Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua, sebagian besar pekerja berada pada sektor jasa (80 persen), sedangkan sektor pertanian hanya sekitar 74 persen. Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten Biak Numfor, Nabire dan Mimika di mana mayoritas pekerja terserap di sektor jasa (lebih dari 50 persen). Di sisi lain, sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk di kabupaten-kabupaten dengan topografi pegunungan. Kabupaten tersebut mempunyai persentase pekerja pertanian lebih dari 95 persen. Yaitu antara lain Kabupaten Nduga, Yalimo, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Dogiyai, dan Intan Jaya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 5.5
Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan usaha
di Provinsi Papua
Tahun 2015



Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Selanjutnya jika ditinjau berdasarkan pendidikannya, pekerja dengan pendidikan SD ke bawah mengelompok di sektor pertanian. Walaupun ada juga pekerja dengan pendidikan tinggi yang termasuk ke dalam sektor ini, yaitu sebanyak 7.981 orang atau sekitar 0,6 persen. Ada dua kemungkinan yang terjadi, yang pertama adalah karena terbatasnya lapangan usaha lain, sehingga mereka terpaksa bekerja di sektor pertanian. Kedua, bisa jadi mereka berperan sebagai pengusaha di bidang pertanian (bukan sebagai buruh tani).

Tabel 5.5 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2015

Lapangan Usaha	Pendidikan yang Ditamatkan					Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian ¹⁾	748 999	235 607	146 190	97 760	7 981	1236 537
Pertambangan ²⁾	877	2 325	1 161	8 717	1 543	14 623
Industri	2 741	3 879	3 847	4 726	989	16 182
LGA ³⁾	0	0	198	2 273	455	2 926
Konstruksi	2 831	5 838	11 643	19 507	3 272	43 091
Perdagangan ⁴⁾	1 7428	20 876	29 444	52 554	5 283	125 585
Transportasi ⁵⁾	2 120	5 332	12 894	21 760	3 099	45 205
Lembaga Keuangan ⁶⁾	317	532	2 261	8 624	6 079	17 813
Jasa ⁷⁾	3 424	6 064	11 713	72 394	76 923	170 518
Jumlah	778 737	280 453	219 351	288 315	105 624	1 672 480

Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Jika lapangan usaha kita rinci lagi menjadi 9 sektor, secara umum tampak bahwa sektor-sektor selain sektor pertanian, lebih membutuhkan spesifikasi pendidikan dengan level lebih tinggi dari SD. Misalnya pada sektor pertambangan, mayoritas pekerja yang terserap sekitar 60 persen adalah lulusan SLTA. Sama halnya dengan sektor industri, listrik dan gas, konstruksi, transportasi, lembaga keuangan, dan jasa di mana hampir 50 persennya menyerap pekerja dengan pendidikan minimal SLTA.

Tabel 5.6
Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan
Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua
Tahun 2015

Lapangan Usaha	Pendidikan yang Ditamatkan					Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian ¹⁾	60,6%	19,1%	11,8%	7,9%	,6%	100
Pertambangan ²⁾	6,0%	15,9%	7,9%	59,6%	10,6%	100
Industri	16,9%	24,0%	23,8%	29,2%	6,1%	100
LGA ³⁾	0,0%	0,0%	6,8%	77,7%	15,6%	100
Konstruksi	6,6%	13,5%	27,0%	45,3%	7,6%	100
Perdagangan ⁴⁾	13,9%	16,6%	23,4%	41,8%	4,2%	100
Transportasi ⁵⁾	4,7%	11,8%	28,5%	48,1%	6,9%	100
Lembaga Keuangan ⁶⁾	1,8%	3,0%	12,7%	48,4%	34,1%	100
Jasa ⁷⁾	2,0%	3,6%	6,9%	42,5%	45,1%	100
Jumlah	46,6%	16,8%	13,1%	17,2%	6,3%	100

Sumber: Sakernas, Agustus 2015

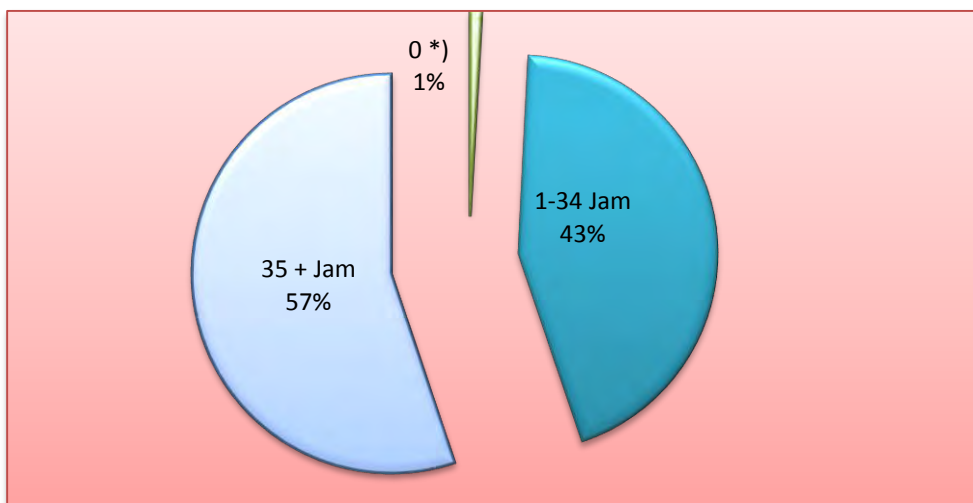
Keterangan:

- 1 : Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2 : Pertambangan dan Penggalian
- 3 : Listrik, Gas, Uap, dan Air
- 4 : Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 5 : Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 6 : Lembaga Keuangan, Real Estate, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 7 : Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

5.5 Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja

Salah satu indikator untuk melihat kinerja pekerja adalah dengan melihat jumlah jam kerja. Hal ini berguna untuk mengetahui proporsi penduduk bekerja yang dapat dikategorikan sebagai pekerja “murni” dan proporsi penduduk bekerja namun dikategorikan pengangguran karena jumlah jam kerjanya kurang dari jumlah jam kerja normal. Di Indonesia seseorang dikatakan murni bekerja apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu dengan konsep jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja tidak termasuk jam istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan. Jumlah jam kerja tersebut merupakan kumulatif selama satu minggu.

Gambar 5.6
Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jam Kerja
di Provinsi Papua
Tahun 2015



Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Secara keseluruhan persentase pekerja terbesar bekerja di atas 35 jam yaitu lebih dari 50 persen. Sementara itu pekerja dengan jam kerja antara 1 sampai 34 jam ada sebanyak 43 persen atau dapat dikategorikan sebagai setengah penganggur. Sedangkan pekerja yang sementara tidak bekerja mempunyai persentase sekitar 1 persen.

Tabel 5.7 berikut menyajikan gambaran mengenai jumlah pekerja menurut jumlah jam kerja dan lapangan usaha. Pada umumnya sebagian besar pekerja memiliki jam kerja normal (di atas 35 jam). Khusus pada sektor pertanian, jumlah pekerja yang bekerja di atas 35 jam dengan di bawah jam kerja normal mempunyai jumlah yang tidak terpaut jauh, yaitu masing-masing secara persentase 45 persen dan 54 persen. Sebaliknya, pada sektor-sektor lain minimal 60 persen pekerjanya bekerja pada jam kerja normal.

Tabel 5.7
Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jumlah Jam Kerja di Provinsi Papua Tahun 2015

Lapangan Usaha	Jumlah Jam Kerja			Jumlah
	Sementara tidak bekerja (0 jam)	Di bawah jam kerja normal (1-34 jam)	Jam kerja normal (≥ 35 jam)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian	7 406	668 148	560 983	1236 537
Pertambangan	123	1 460	13 040	14 623
Industri	253	5 439	10 490	16 182
LGA	0	93	2 833	2 926
Konstruksi	789	3 138	39 164	43 091
Perdagangan	1 590	22 913	101 082	125 585
Transportasi	330	3 874	41 001	45 205
Lembaga Keuangan	0	1 804	16 009	17 813
Jasa	2 615	30 002	137 901	170 518
Jumlah	1 3106	736 871	922 503	1672 480
%	0 78	44 06	55 16	100 00

Sumber: Sakernas, Agustus 2015

5.6 Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan

Status pekerjaan merupakan kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Salah satu kegunaan dalam menganalisis status pekerjaan pekerja adalah untuk mengetahui pekerja di sektor informal.

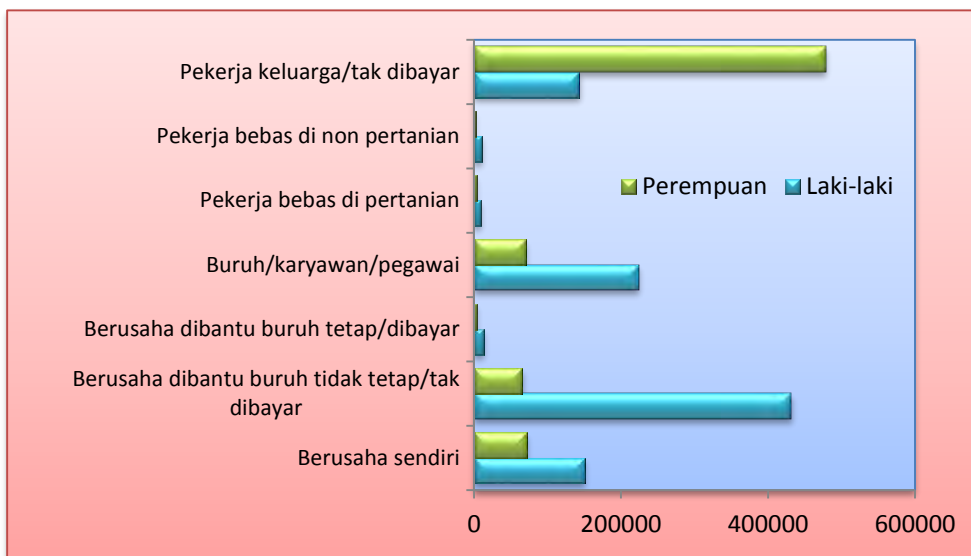
Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2015, tercatat bahwa status pekerjaan mayoritas pekerja di Papua adalah sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar yang berturut-turut mempunyai persentase 37,14 persen dan 29,7 persen. Selanjutnya adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 16,5 persen.

Bila ditinjau dari segi jenis kelaminnya, maka perempuan lebih banyak bekerja sebagai pekerja keluarga/tak dibayar. Secara persentase besarnya adalah 77 persen, dan sisanya 23 adalah laki-laki. Ketimpangan lain terjadi pada status buruh/karyawan/pegawai, di mana lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Laki-laki yang berstatus sebagai buruh/karyawan ada sebanyak 223.515 orang (76 persen), sementara perempuan hanya sebanyak 70.230 orang (24 persen). Hal ini memberikan kesimpulan bahwa secara umum laki-laki lebih dominan dalam hal pekerjaan. Meskipun pada status pekerja keluarga perempuan lebih

mendominasi, namun kenyataannya mereka tidak menerima upah atau penghasilan dari apa yang mereka kerjakan.

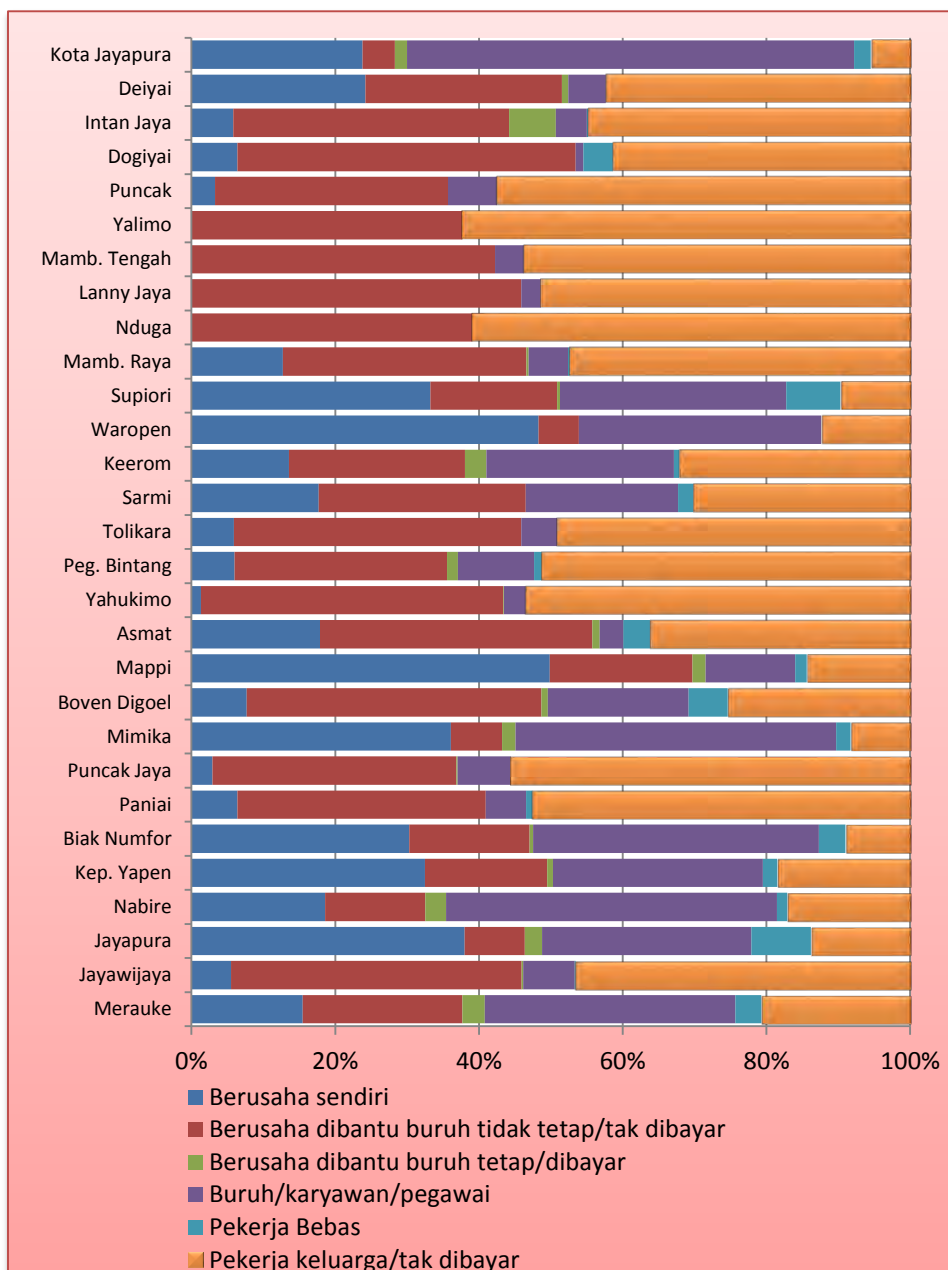
Gambar 5.7

Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015



Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Gambar 5.8
Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan di
Provinsi Papua
Tahun 2015

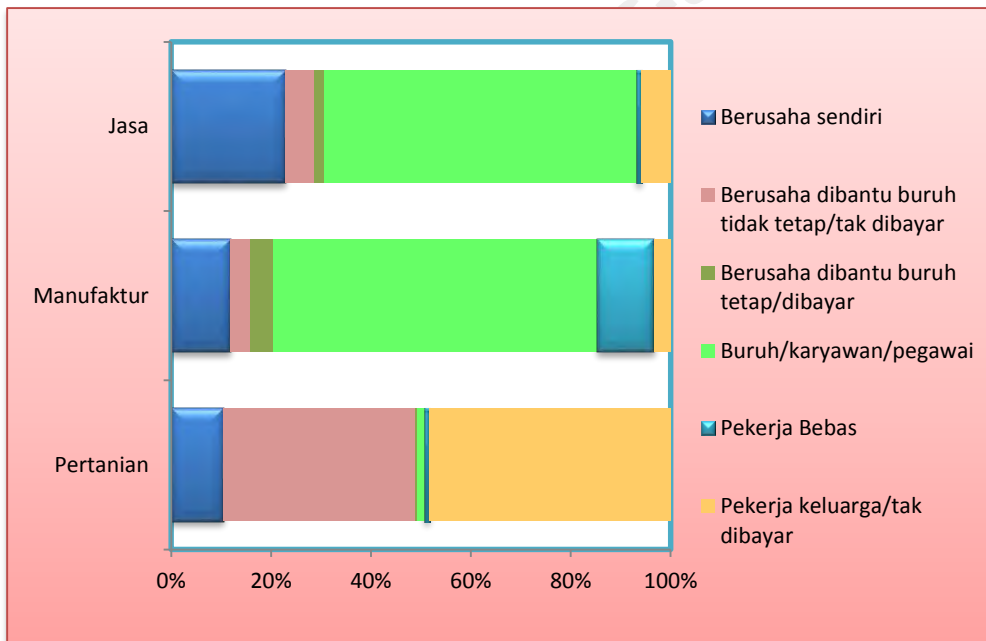


Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Gambaran mengenai distribusi pekerja menurut status pekerjaan menurut topografi disajikan pada Gambar 5.8 di atas. Pada beberapa kabupaten di dataran mudah terlihat bahwa mayoritas penduduknya bekerja dengan status buruh//karyawan. Lain halnya dengan wilayah pegunungan seperti Kabupaten Mamberamo Tengah, Yalimo, Yahukimo, Tolikara, Paniai, dan Dogiyai, yang mempunyai kecenderungan bahwa mayoritas pekerjaannya adalah pekerja keluarga dan berusaha dibantu buruh tidak tetap. Sementara itu, di daerah pegunungan, penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan relatif sangat sedikit.

Sebagian besar pekerja di pegunungan berstatus sebagai pekerja tak dibayar.

Gambar 5.9
Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2015



Sumber: Sakernas, Agustus 2015

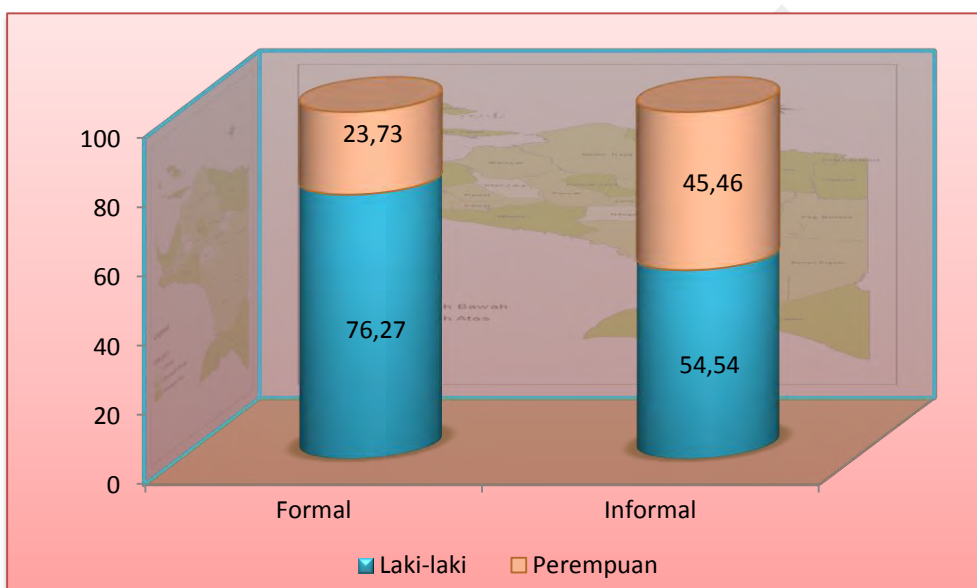
Jika ditinjau berdasarkan lapangan usahanya, maka jelas terlihat perbedaan status pekerjaan antara pertanian, manufaktur, dan jasa. Sebagian besar pekerja pertanian berstatus sebagai pekerja keluarga dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, masing-masing memiliki persentase 48 persen dan 38 persen. Sementara itu sektor manufaktur lebih didominasi

oleh pekerja dengan status sebagai buruh/karyawan di mana persentasenya mencapai 65 persen. Demikian halnya dengan sektor jasa sebanyak 63 persennya merupakan pekerja dengan status buruh/karyawan.

5.7 Penduduk Bekerja menurut Sektor Fomal Informal

Sesuai dengan definisi yang dijelaskan pada Bab II tentang klasifikasi sektor formal dan informal, hanya sekitar 19 persen penduduk bekerja di sektor formal, sisanya 81 persen merupakan pekerja sektor informal.

Gambar 5.10
Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2015

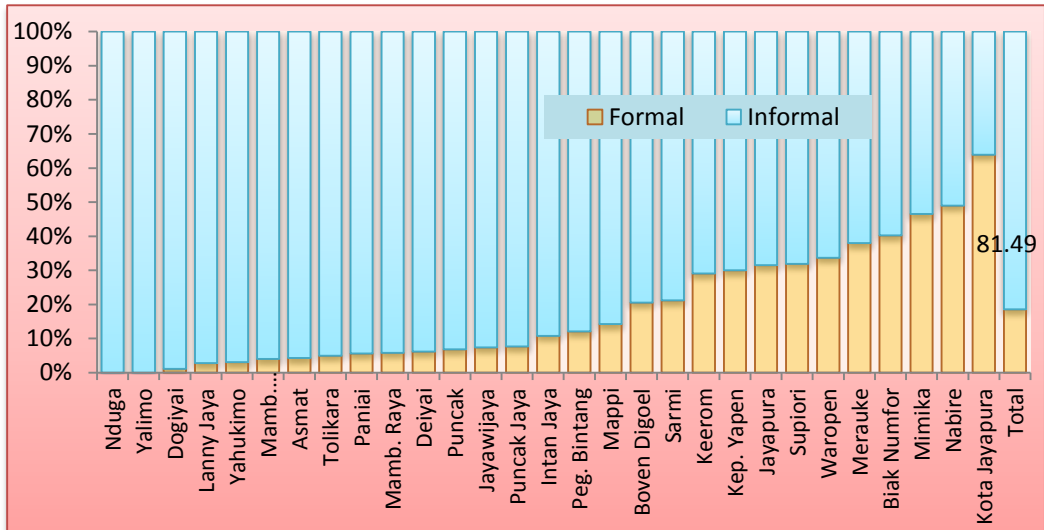


Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Sementara jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, jelas terlihat bahwa sektor formal lebih banyak didominasi oleh laki-laki, sedangkan sektor informal relatif seimbang antara pekerja laki-laki dan perempuan.

Banyaknya pekerja di sektor informal sangat berkaitan dengan banyaknya penduduk bekerja pada sektor pertanian. Seperti telah dipaparkan sebelumnya bahwa pertanian mendominasi penyerapan tenaga kerja di sebagian besar kabupaten di Provinsi Papua. Banyaknya penduduk bekerja di sektor pertanian, terutama yang berstatus pekerja tidak dibayar menyebabkan tingginya persentase pekerja sektor informal.

Gambar 5.11
Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status dan Topografi di
Provinsi Papua Tahun 2015



Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Jika dilihat sebaran pekerja formal dan informal di kabupaten/kota di Provinsi Papua terlihat bahwa pekerja formal lebih banyak terdapat di daerah dataran mudah. Di pihak lain, pekerja informal lebih banyak mendominasi di daerah pegunungan.

BAB 6

PENGANGGURAN

BAB VI

PENGANGGURAN

6.1 Pengangguran menurut Kelompok Umur

Pengangguran secara konsepsi merupakan bagian dari angkatan kerja. Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibanding lowongan yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.

Pada tahun 2015, jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Papua adalah sebanyak 69.465 orang atau sebesar 3,99 persen dari total angkatan kerja. Banyak pemerhati ketenagakerjaan berpendapat bahwa nilai ini adalah terlalu kecil. Namun, perlu diingat kembali bahwa seseorang yang bekerja membantu orang tuanya walaupun sebentar asalkan lebih dari 1 jam dalam satu minggu tetap tergolong sebagai bekerja.

Gambar 6.1 berikut menggambarkan jumlah pengangguran yang dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

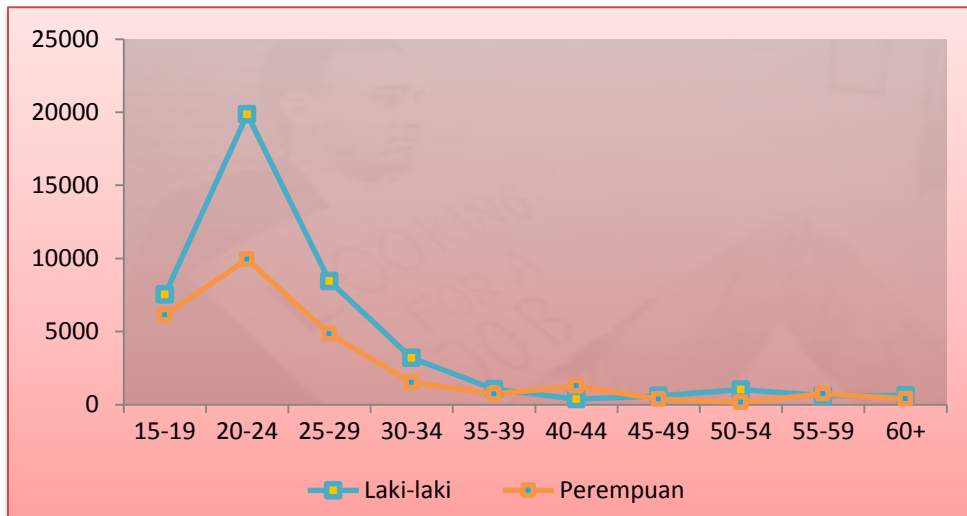
Jumlah pengangguran di Papua sebesar 69.465 orang

Jumlah pengangguran paling tinggi berada pada kelompok usia 20-24 tahun, baik pada laki-laki maupun perempuan. Hal ini ditengarai karena sebagai output dari dunia pendidikan.

Pengangguran terbanyak berada pada kelompok usia 20-24 tahun

Pada umur-umur tersebut banyak orang yang setelah lulus sekolah sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

Gambar 6.1
Pengangguran menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua
Tahun 2015



Sumber: Sakernas, Agustus 2015

6.2 Pengangguran menurut Kabupaten/Kota

Secara keseluruhan, sebagian besar pengangguran di Papua adalah laki-laki yaitu 43.345 orang atau sekitar 62,4 persen. Jika ditinjau menurut kabupaten/kota, pengangguran terbanyak terjadi di Kota Jayapura sebesar 13.163 (18,95%) orang. Hal ini terjadi karena banyak penduduk dari berbagai kabupaten yang datang untuk mencari pekerjaan di ibukota provinsi ini, mengingat lebih banyak peluang dan fasilitas yang disediakan dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain.

Di beberapa kabupaten, angka pengangguran mencapai nol persen. Artinya semua angkatan kerja terserap seluruhnya dalam pasar kerja yang ada. Kabupaten tersebut diantaranya adalah: Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya. Jika ditinjau lebih dalam, kabupaten-kabupaten yang memiliki angka pengangguran nol persen adalah kabupaten yang masuk kategori wilayah pegunungan dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian.

Tabel 6.1
Pengangguran menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua
Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9401. Merauke	5 781	4 071	9 852
9402. Jayawijaya	0	75	75
9403. Jayapura	5 223	2 087	7 310
9404. Nabire	4 011	3 035	7 046
9408. Kep. Yapen	1 539	1 662	3 201
9409. Biak Numfor	3 626	2 151	5 777
9410. Paniai	767	119	886
9411. Puncak Jaya	346	373	719
9412. Mimika	5 192	2 316	7 508
9413. Boven Digoel	1 032	659	1 691
9414. Mappi	799	578	1 377
9415. Asmat	85	139	224
9416. Yahukimo	608	0	608
9417. Peg. Bintang	727	514	1 241
9418. Tolikara	294	127	421
9419. Sarmi	233	337	570
9420. Keerom	607	651	1 258
9426. Waropen	240	222	462
9427. Supiori	364	360	724
9428. Mamb. Raya	28	308	336
9429. Nduga	1 601	0	1 601
9430. Lanny Jaya	0	0	0
9431. Mamb. Tengah	0	0	0
9432. Yalimo	22	0	22
9433. Puncak	158	442	600
9434. Dogiyai	431	0	431
9435. Intan Jaya	0	0	0
9436. Deiyai	1 162	1 200	2 362
9471. Kota Jayapura	8 469	4 694	13 163
Jumlah (Papua)	43 345	26 120	69 465

Sumber: Sakernas, Agustus 2015

6.3 Pengangguran menurut Kegiatannya

Pengangguran menurut kegiatannya terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa/ merasa tidak mungkin dapat kerja, dan sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai

bekerja. Tabel 6.2 berikut menyajikan gambaran tentang jumlah pengangguran menurut jenis kelamin dan kegiatannya.

Tabel 6.2
Pengangguran menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua
Tahun 2015

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mencari Pekerjaan	31 120	19 246	50 366	72,51
Mempersiapkan Usaha	578	760	1 338	1,93
Putus asa/merasa tidak mungkin mendapat kerja	8 400	4 876	13 276	19,11
Sudah punya tapi belum mulai kerja	3 247	1 238	4 485	6,46
Jumlah	43 345	26 120	69 465	100

Sumber: Sakernas, Agustus 2014

Bila dilihat menurut kegiatannya, dari seluruh pengangguran di Papua, persentase terbesar adalah yang mencari pekerjaan sekitar 73 persen. Mereka yang mencari pekerjaan adalah mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; mereka yang sudah pernah bekerja, karena suatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; serta mereka yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena suatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Persentase terkecil terdapat pada kegiatan mempersiapkan usaha, yaitu sebesar 1,93 persen. Mempersiapkan usaha cenderung pada pekerjaan yang berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tetap atau berusaha dibantu buruh tetap. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan penduduk untuk berwiraswasta sangat kecil, dan mereka lebih memilih mencari pekerjaan daripada membuka lapangan usaha. Di samping itu ada sebanyak 6,5 persen pengangguran yang sudah diterima bekerja, namun belum mulai bekerja. Hampir pasti angka ini akan bergeser dari status sebagai pengangguran menjadi bekerja.

Kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar pengangguran di Papua adalah mencari pekerjaan

6.4 Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan



Total Angka **Pengangguran berijazah (SLTA+) di Papua** mencapai

45.897 orang

(Sakernas, Agustus 2015)

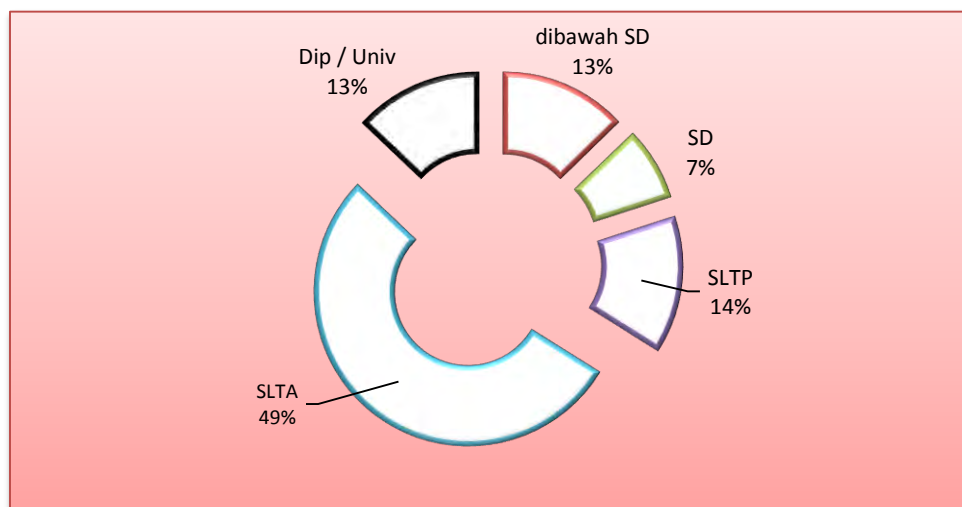
Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam pasar tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui sarana pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang yang termasuk angkatan kerja akan mempengaruhi dan meningkatkan tingkat produktivitas dalam pekerjaannya. Untuk itu analisis pengangguran menurut tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai indikator ketidakmampuan pasar tenaga kerja memanfaatkan *supply* angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terdidik merupakan indikator dari besarnya jumlah dan persentase pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi di suatu wilayah. Secara absolut, jumlah pengangguran di Papua terdistribusi di semua jenjang pendidikan, seperti disajikan pada gambar 6.2. Separuh lebih pengangguran di Provinsi Papua berpendidikan SLTA/ sederajat, yaitu sebesar 53 persen. Selanjutnya adalah diploma/universitas sebesar 13 persen.

Tingginya pengangguran pada pendidikan tinggi lebih disebabkan karena mereka lebih bersifat selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan atau keterampilan yang mereka miliki. Seringkali terjadi bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu, mereka memiliki kecenderungan untuk lebih memilih mencari pekerjaan di sektor formal daripada informal, sehingga menyebabkan angka pengangguran yang berpendidikan menengah/tinggi lebih tinggi dibanding yang berpendidikan rendah.

Separuh lebih pengangguran di Provinsi Papua berpendidikan tinggi

Gambar 6.2
Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2015



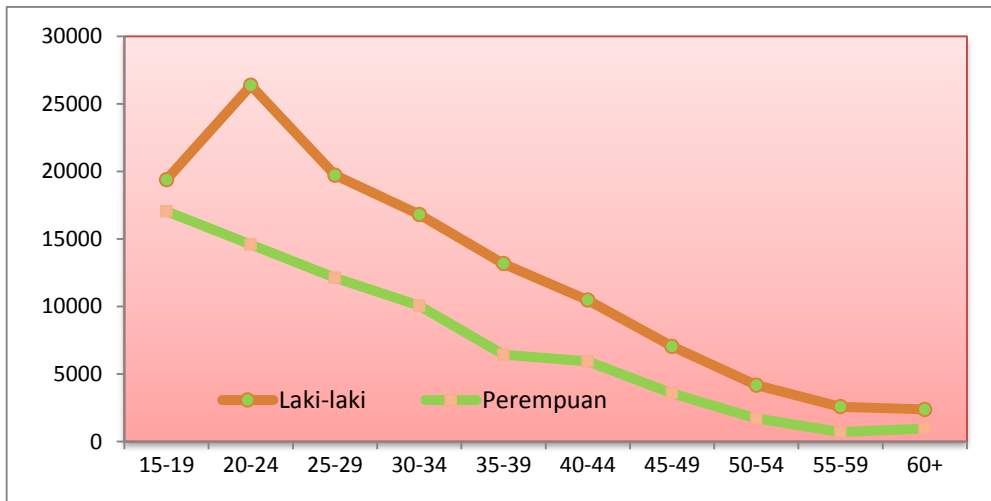
Sumber: Sakernas, Agustus 2015

6.5 Setengah Pengangguran

Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dikategorikan dalam kelompok setengah pengangguran. Jumlah setengah pengangguran di Provinsi Papua Tahun 2014 adalah sebanyak 736.871 orang, yang terdiri dari 195.280 orang setengah penganggur terpaksa (26,5 persen), dan 541.591 orang setengah penganggur sukarela (73,5 persen).

Dalam kenyataannya setengah pengangguran sukarela tidak terlalu diperhitungkan dalam kategori pengangguran. Hal ini karena setengah penganggur sukarela memang tidak sedang mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, meskipun jam kerjanya kurang dari jam kerja normal.

Gambar 6.3
Setengah Penganggur Terpaksa menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Provinsi Papua
Tahun 2015

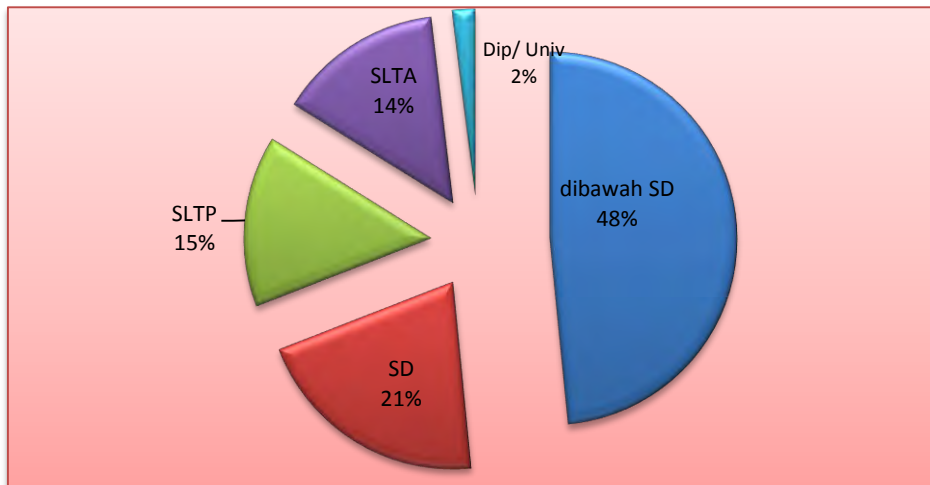


Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Setengah penganggur terpaksa paling banyak berada pada kelompok umur 20-24 tahun. Pada kelompok usia ini, kecenderungan mencari pekerjaan atau menerima tawaran pekerjaan lain masih tinggi. Artinya mereka yang masih bekerja di bawah jam kerja normal masih punya keinginan untuk menambah pekerjaan lain (paruh waktu) atau mencari pekerjaan lain yang lebih sesuai. Dengan semakin meningkatnya umur, maka jumlah setengah penganggur pun semakin menurun.

Jika dilihat berdasarkan gender, secara umum jumlah penganggur terpaksa lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Hal ini terjadi di semua kategori kelompok umur, dan secara perlahan keduanya menurun menjelang usia 50 tahun.

Gambar 6.4
Setengah Penganggur Terpaksa menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2015



Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Berbeda dengan pengangguran terbuka, sebagian besar setengah penganggur terpaksa berpendidikan SD ke bawah, yaitu sekitar 69 persen. Penduduk yang berpendidikan rendah cenderung bekerja seadanya, dan masih mencari pekerjaan yang lebih baik karena tuntutan ekonomi.

BAB 7

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN

BAB VII

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN

7.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa.

Secara keseluruhan, TPAK Provinsi Papua pada tahun 2015 adalah sebesar 79,57 persen. Umumnya TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Pada level provinsi, TPAK laki-laki adalah 87,66 persen, sementara perempuan 70,3 persen. Begitu juga TPAK pada seluruh kabupaten/kota, di mana partisipasi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

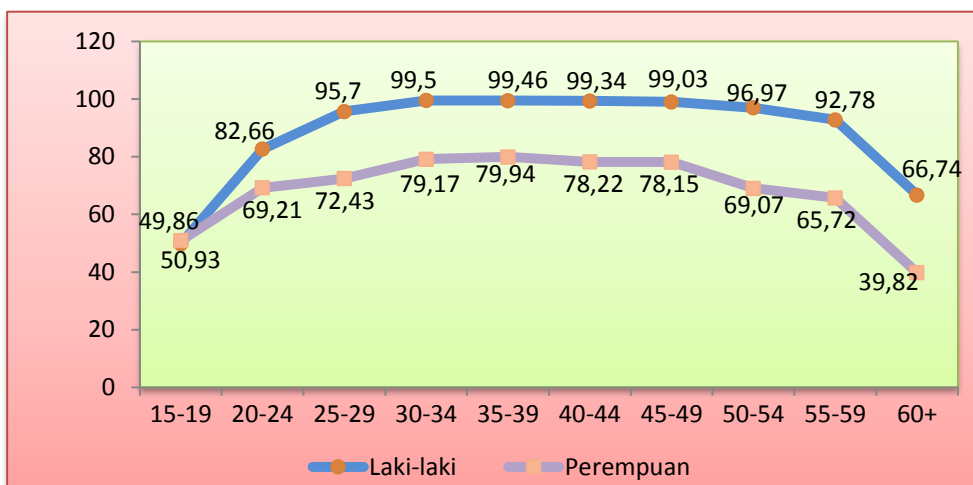
Pada tahun 2015, TPAK Provinsi Papua adalah 79,6 persen

TPAK paling tinggi terdapat di Kabupaten Nduga yaitu 99,3 persen, dan terendah di Kabupaten Supiori sebesar 55,4 persen. Tingginya TPAK di Kabupaten Nduga antara lain dipengaruhi oleh dominasi sektor pertanian terhadap perekonomian.

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, maka tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi selalu lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini terjadi pada setiap kelompok umur. Partisipasi laki-laki paling tinggi adalah pada usia 30-34 tahun (99,5 persen). Hal ini berarti usia puncak pada laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi adalah antara umur 30-34 tahun, sedangkan untuk perempuan antara umur 35-39 tahun.

Partisipasi perempuan untuk aktif secara ekonomi pada setiap kelompok umur selalu lebih rendah daripada laki-laki

Gambar 7.1
TPAK menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua
Tahun 2015



Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Tabel 7.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
di Provinsi Papua
Tahun 2015

Kabupaten/Kota	TPAK		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9401. Merauke	87,32	51,32	70,30
9402. Jayawijaya	89,20	87,08	88,17
9403. Jayapura	75,74	42,38	60,32
9404. Nabire	83,71	51,42	69,02
9408. Kep. Yapen	82,13	54,31	68,69
9409. Biak Numfor	76,52	41,33	59,66
9410. Paniai	93,01	95,01	93,97
9411. Puncak Jaya	96,55	91,59	94,28
9412. Mimika	86,45	36,57	65,75
9413. Boven Digoel	89,23	55,15	74,27
9414. Mappi	87,10	75,81	81,60
9415. Asmat	86,30	67,68	77,18
9416. Yahukimo	92,87	87,75	90,41
9417. Peg. Bintang	95,60	95,83	95,71
9418. Tolikara	97,28	96,76	97,04
9419. Sarmi	81,13	61,38	72,20
9420. Keerom	88,53	65,37	78,22
9426. Waropen	80,33	26,21	54,12
9427. Supiori	73,92	41,52	57,99
9428. Mamb. Raya	89,20	71,10	80,36
9429. Nduga	98,38	98,81	98,57
9430. Lanny Jaya	92,76	94,80	93,71
9431. Mamb. Tengah	98,60	99,36	98,95
9432. Yalimo	100,00	99,34	99,69
9433. Puncak	92,77	82,11	87,66
9434. Dogiyai	91,81	94,94	93,39
9435. Intan Jaya	91,63	77,97	84,98
9436. Deiyai	89,66	89,80	89,73
9471. Kota Jayapura	74,36	42,29	59,72
Jumlah (Papua)	87,66	70,33	79,57

Sumber: Sakernas, Agustus 2015

7.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator penting berikutnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase pengangguran terhadap angkatan kerja. TPT Provinsi Papua pada tahun 2015 adalah sebesar 3,99 persen terhadap total angkatan kerja. Jika ditinjau per kabupaten/kota, tingkat pengangguran paling tinggi ada di Kabupaten Supiori sebesar 14 persen. Menyusul berikutnya adalah Kabupaten Supiori sebesar 10,75 persen. Di sisi lain, pada kabupaten di daerah pegunungan, seperti Kabupaten, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Intan Jaya memiliki TPT nol persen. Artinya tidak ada pengangguran di kabupaten-kabupaten tersebut.

*Kabupaten
Jayapura
mempunyai TPT
paling tinggi di
Papua yaitu 14
persen pada tahun
2015*

Tabel 7.2
Tingkat Pangangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di
Provinsi Papua
Tahun 2015

Kabupaten/Kota	TPT		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9401. Merauke	8,13	10,87	9,08
9402. Jayawijaya	0,00	0,12	0,06
9403. Jayapura	14,85	12,34	14,03
9404. Nabire	8,73	12,89	10,14
9408. Kep. Yapen	5,87	10,25	7,54
9409. Biak Numfor	9,47	11,30	10,08
9410. Paniai	1,40	0,23	0,83
9411. Puncak Jaya	0,77	1,04	0,89
9412. Mimika	7,14	10,61	7,94
9413. Boven Digoel	4,84	6,39	5,35
9414. Mappi	3,11	2,72	2,94
9415. Asmat	0,35	0,76	0,53
9416. Yahukimo	1,03	0,00	0,55
9417. Peg. Bintang	3,02	2,39	2,72
9418. Tolikara	0,62	0,32	0,48
9419. Sarmi	2,04	4,72	3,07
9420. Keerom	3,22	5,83	4,19
9426. Waropen	3,01	9,08	4,43
9427. Supiori	8,34	15,18	10,75
9428. Mamb. Raya	0,46	6,68	3,15
9429. Nduga	4,86	0,00	2,70
9430. Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00
9431. Mamb. Tengah	0,00	0,00	0,00
9432. Yalimo	0,10	0,00	0,05
9433. Puncak	0,46	1,58	0,96
9434. Dogiyai	1,58	0,00	0,77
9435. Intan Jaya	0,00	0,00	0,00
9436. Deiyai	5,41	5,89	5,64
9471. Kota Jayapura	9,86	11,44	10,37
Jumlah (Papua)	4,24	3,63	3,99

Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Semakin kecil persentase TPT menunjukkan semakin besarnya tenaga kerja yang terserap dalam lapangan usaha/sector, juga mencerminkan kestabilan suatu daerah di bidang ketenagakerjaan. Apabila

terlalu banyak tenaga kerja yang tidak tertampung di lapangan usaha, atau lapangan usaha sangat terbatas untuk menyerap tenaga kerja yang terindikasi melalui TPT yang tinggi, maka masalah sosial (kejahatan, demonstrasi dan lainnya) akan sangat rawan.

7.3 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Selain TPAK dan TPT, masih ada satu indikator ketenagakerjaan yaitu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), merupakan persentase tenaga kerja yang terserap pada seluruh sektor-sektor yang ada terhadap angkatan kerja. Dengan kata lain, TKK merupakan selisih TPT terhadap 100 persen.

Semakin tinggi TKK, semakin banyak tenaga kerja yang terserap, akhirnya semakin stabil keadaan suatu daerah dalam hal ketenagakerjaan. Dari Tabel 7.3 berikut secara umum TKK di Provinsi Papua tergolong tinggi, bahkan beberapa kabupaten di daerah pegunungan mempunyai TKK sebesar 100 persen, seperti Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Intan Jaya.

Tingginya TKK di Papua disebabkan sebagian besar tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian atau tingkat pendidikan yang cukup tidak langsung menganggur, karena mereka diserap oleh sektor pertanian yang masih tradisional.

Semakin tinggi TKK, makin banyak tenaga kerja yang terserap pada sektor-sektor yang ada

Tabel 7.3
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
di Provinsi Papua
Tahun 2015

Kabupaten/Kota	TKK		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9401. Merauke	91,87	89,13	90,92
9402. Jayawijaya	100,00	99,88	99,94
9403. Jayapura	85,15	87,66	85,97
9404. Nabire	91,27	87,11	89,86
9408. Kep. Yapen	94,13	89,75	92,46
9409. Biak Numfor	90,53	88,70	89,92
9410. Paniai	98,60	99,77	99,17
9411. Puncak Jaya	99,23	98,96	99,11
9412. Mimika	92,86	89,39	92,06
9413. Boven Digoel	95,16	93,61	94,65
9414. Mappi	96,89	97,28	97,06
9415. Asmat	99,65	99,24	99,47
9416. Yahukimo	98,97	100,00	99,45
9417. Peg. Bintang	96,98	97,61	97,28
9418. Tolikara	99,38	99,68	99,52
9419. Sarmi	97,96	95,28	96,93
9420. Keerom	96,78	94,17	95,81
9426. Waropen	96,99	90,92	95,57
9427. Supiori	91,66	84,82	89,25
9428. Mamb. Raya	99,54	93,32	96,85
9429. Nduga	95,14	100,00	97,30
9430. Lanny Jaya	100,00	100,00	100,00
9431. Mamb. Tengah	100,00	100,00	100,00
9432. Yalimo	99,90	100,00	99,95
9433. Puncak	99,54	98,42	99,04
9434. Dogiyai	98,42	100,00	99,23
9435. Intan Jaya	100,00	100,00	100,00
9436. Deiyai	94,59	94,11	94,36
9471. Kota Jayapura	90,14	88,56	89,63
Jumlah (Papua)	95,76	96,37	96,01

Sumber: Sakernas, Agustus 2015

7.4 Perkembangan Indikator Tenaga Kerja

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, penduduk usia kerja juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlah penduduk usia kerja adalah sebanyak 1.375.169 orang, dan

meningkat 27 persen menjadi 2.189.230 orang pada tahun 2015. Selama kurun waktu 2011 hingga 2015, peningkatan penduduk usia kerja selalu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah angkatan kerja.

Menurunnya angka pengangguran yang disertai dengan meningkatnya TPAK adalah pencapaian ideal yang diharapkan. Pada tahun 2011 TPT mencapai sekitar 8 persen, dan menurun sepanjang tahun 2012-2015 menjadi 3,99. Kondisi ini diiringi juga dengan peningkatan TPAK dari 68,8 persen menjadi 79,57 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perubahan kondisi ketenagakerjaan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 7.4
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Papua
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angkatan Kerja	1 375 169	1 557 089	1 610 484	1 675 113	1 741 945
Bukan Angkatan Kerja	622 204	432 314	462 222	454 291	447 285
Usia Kerja	1 997 373	1 989 403	2 072 706	2 129 404	2 189 230
TPAK	68,8	78,27	77,7	78,7	79,57
TPT	8,8	3,65	3,15	3,4	3,99
TKK	91,2	96,4	96,8	96,6	96,01

Sumber: Sakernas, Agustus 2011-2015

7.5 Penduduk Bukan Angkatan Kerja

Tabel 7.5
Penduduk Bukan Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan
di Provinsi Papua
Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan			Jumlah
	Sekolah	Mengurus RT	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9401. Merauke	15 511	27 564	2 783	45 858
9402. Jayawijaya	14 170	3 736	0	17 906
9403. Jayapura	12 647	17 624	4 000	34 271
9404. Nabire	10 971	16 977	3 235	31 183
9408. Kep. Yapen	6 634	10 069	2 648	19 351
9409. Biak Numfor	12 953	20 936	4 879	38 768
9410. Paniai	5 077	800	931	6 808
9411. Puncak Jaya	958	2 535	1 415	4 908
9412. Mimika	10 924	34 017	4 315	49 256
9413. Boven Digoel	3 698	6 526	731	10 955
9414. Mappi	4 950	5 088	539	10 577
9415. Asmat	2 173	5 632	4 743	12 548
9416. Yahukimo	5 418	5 829	503	11 750
9417. Peg. Bintang	1 356	421	268	2 045
9418. Tolikara	2 050	614	0	2 664
9419. Sarmi	3 157	3 180	818	7 155
9420. Keerom	3 105	4 243	1 011	8 359
9426. Waropen	1 946	6 224	671	8 841
9427. Supiori	1 444	2 342	1 094	4 880
9428. Mamb. Raya	1 118	1 044	448	2 610
9429. Nduga	147	0	713	860
9430. Lanny Jaya	6 289	86	999	7 374
9431. Mamb. Tengah	234	0	95	329
9432. Yalimo	57	0	70	127
9433. Puncak	2 361	5 864	547	8 772
9434. Dogiyai	2 280	1 525	163	3 968
9435. Intan Jaya	1 566	3 091	112	4 769
9436. Deiyai	4 111	681	0	4 792
9471. Kota Jayapura	37 644	43 642	4 315	85 601
Jumlah (Papua)	174 949	230 290	42 046	447 285

Sumber: Sakernas, Agustus 2015

Bahasan ini sengaja ditampilkan satu bab bersama indikator ketenagakerjaan, sehingga dapat diketahui penyebaran penduduk bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak

bekerja maupun sementara tidak bekerja. Dengan kata lain yang dikerjakan oleh penduduk bukan angkatan kerja adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Secara keseluruhan, sebagian besar penduduk bukan angkatan kerja di Papua adalah mengurus rumah tangga yaitu sebesar 51,49 persen. Selanjutnya penduduk yang bersekolah sebesar 39,11 persen dan yang melakukan kegiatan lainnya ada sebesar 9,4 persen.

Sementara itu, jumlah penduduk bukan angkatan kerja di masing-masing kabupaten/kota berada pada rentang 127 (Yalimo) sampai 85.601 (Kota Jayapura). Nilai nol di sini bukan berarti bahwa tidak ada penduduk usia kerja yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya, tetapi lebih karena azas eksklusifitas yang menggolongkan orang hanya ke dalam satu jenis kegiatan.

<http://papua.bps.go.id>

BAB 8

KESIMPULAN

BAB VIII KESIMPULAN

Tujuan disusunnya publikasi ini adalah untuk memberikan gambaran ketenagakerjaan di Provinsi Papua pada tahun 2015. Berikut beberapa kesimpulan yang diperoleh dari publikasi ini:

i. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja di Papua pada tahun 2015 mencapai 2.189.230 orang, di mana persentase penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak dari pada perempuan dan jumlah terbesar penduduk usia kerja terdapat pada kelompok usia muda yaitu 15-44 tahun yang mencapai 77,82 persen. Kegiatan utama yang paling banyak dilakukan penduduk usia kerja selama seminggu yang lalu adalah bekerja dengan persentase sebesar 76 persen.

ii. Penduduk Angkatan Kerja

Jumlah penduduk angkatan kerja di Papua pada tahun 2015 adalah 1.741.945 orang. Angkatan kerja paling banyak berada pada kelompok umur 25-29 tahun yang mencapai 14 persen. Tingkat pendidikan angkatan kerja di Papua masih tergolong rendah, di mana jumlahnya lebih dari separuh dari total angkatan kerja SD ke bawah, bahkan 39 persennya berpendidikan tidak tamat SD.

iii. Penduduk Bekerja

Penduduk bekerja di Papua pada tahun 2015 ada sebanyak 1.672.480 orang atau setara dengan 76,40 persen dari total penduduk usia kerja. Jumlah terbanyak pekerja berada pada usia 30-34 tahun yang besarnya mencapai 243.379 orang atau sekitar 14,55 persen dari seluruh pekerja. Sementara itu, lebih dari separuh pekerja berpendidikan SD ke bawah. Sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Papua.

iv. Pengangguran

Jumlah pengangguran di Provinsi Papua pada tahun 2015 sebanyak 69.465 orang atau sekitar 4,99 persen dari total angkatan kerja, di mana 62 persen adalah laki-laki dan sisanya 38 persen perempuan. Persentase pengangguran terbanyak berada pada kelompok usia 20-24 tahun.

Sementara itu, lebih dari separuh penganggur adalah berpendidikan tinggi (SLTA ke atas). Menurut kegiatannya, pengangguran karena mencari pekerjaan mempunyai persentase paling besar yaitu sekitar 73 persen.

v. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Secara umum TPAK di Provinsi Papua tergolong tinggi, yaitu sebesar 79,57 persen. Tingkat partisipasi laki-laki lebih besar dibanding perempuan di semua kabupaten/kota, kecuali pada Kabupaten Dogiyai.

vi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada tahun 2015, TPT Provinsi Papua adalah sebesar 3,99 persen. Kabupaten Jayapura memiliki tingkat pengangguran paling tinggi di Papua, yaitu sebesar 14 persen. Sedangkan di beberapa kabupaten di pegunungan mempunyai TPT hampir nol persen.


vii. Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Dibanding tahun 2015, kondisi ketenagakerjaan di Papua memperlihatkan adanya perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan TPAK, namun demikian pada rentang waktu yang sama TPT mengalami kenaikan dari 3,44 persen menjadi 3,99 persen

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**
Statistics of Papua Province

Jl. DR. Samratulangi Dok II Jayapura 99112
Telp. (0967) 533028, 534519 Fax. (0967) 536490
E-mail: bps9400@bps.go.id Homepage: <http://papua.bps.go.id>

ISSN 2477-4138



9 772477 455003